

**MODEL EVALUASI PENJAMINAN MUTU
PENDIDIKAN AGAMA ISLAM DI SEKOLAH DASAR
(Studi Multi Kasus di Kota Semarang)**



Oleh:

**ANDIKA WISNU
NIM. 12010170030**

**Tesis diajukan sebagai pelengkap persyaratan
untuk gelar Magister Pendidikan**

**PROGRAM PASCASARJANA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SALATIGA
2021**



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) SALATIGA
PROGRAM PASCASARJANA

Jalan Lingkar Salatiga Km.02 Telepon (0298) 323706 Faksimile. (0298) 323433 Salatiga 50716
Website: <https://www.pps.iainsalatiga.ac.id>

PROGRAM PASCASARJANA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SALATIGA
PROGRAM STUDI : MAGISTER PENDIDIKAN AGAMA ISLAM

LEMBAR PENGESAHAN UJIAN TESIS

Nama : Andika Wisnu
NIM : 12010170030
Program Studi : Magister Pendidikan Agama Islam
Tanggal Ujian : 25 Juni 2021
Judul Tesis : MODEL EVALUASI PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN AGAMA ISLAM DI SEKOLAH DASAR (STUDI MULTI KASUS DI KOTA SEMARANG)

Panitia Penguji Tesis	Nama	Tanda Tangan (√)
1. Ketua Penguji	: Prof. Dr. Phil. Asfa Widiyanto, M.A.	√
2. Sekretaris	: Dr. Ruwandi, M.A.	√
3. Penguji I	: Dr. Mukh. Nursikin, M.Si.	√
4. Penguji II	: Noor Malihah, Ph.D.	√



Direktur,

Prof. Dr. Phil. Widiyanto, M.A.
NIP. 19751122 200003 1 001

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN DAN KESEDIAAN PUBLIKASI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Andika Wisnu

NIM : 12010170030

Program Studi : Pascasarjana Pendidikan Agama Islam

Menyatakan bahwa Tesis yang saya buat ini benar-benar merupakan hasil karya sendiri, bukan jiplakan dari karya tulis orang lain. Pendapat atau temuan orang lain yang terdapat dalam tesis ini dikutip atau dirujuk berdasarkan kode etik ilmiah. Tesis ini diperbolehkan untuk dipublikasikan oleh Perpustakaan IAIN Salatiga.

Salatiga, 18 Juni 2021

Yang membuat pernyataan



Andika Wisnu

MOTTO

وَلِكُلِّ وَّجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيُّهَا فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ أَيْنَ مَا تَكُونُوا يَأْتِ بِكُمْ اللَّهُ جَمِيعًا إِنَّ اللَّهَ
عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ

Dan setiap umat mempunyai kiblat yang dia menghadap kepadanya. Maka berlomba-lombalah kamu dalam kebaikan. Di mana saja kamu berada, pasti Allah akan mengumpulkan kamu semuanya. Sungguh, Allah Mahakuasa atas segala sesuatu.

(Q.S. Al-Baqarah: 148)

ABSTRAK

Wisnu, Andika. 2021. *Model Evaluasi Penjaminan Mutu Pendidikan Agama Islam di Sekolah Dasar (Studi Multi Kasus di Kota Semarang)*. Tesis Program Studi Pendidikan Agama Islam (PAI), Pascasarjana, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Salatiga. Pembimbing: Prof. Dr. Winarno, M.Pd.

Penelitian ini bertujuan untuk menguraikan implementasi sistem penjaminan mutu internal (SPMI), faktor penghambat dan faktor pendukungnya dan model evaluasi penjaminan mutu pendidikan agama islam di sekolah dasar (studi multi kasus di Kota Semarang). Jenis penelitian yang digunakan yaitu penelitian etnometodologi dengan pendekatan kualitatif.

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui: (1) observasi; (2) wawancara, dan; (3) dokumentasi. Yang divalidasi menggunakan teknik triangulasi sumber data dan teknik pengumpulan data.

Metode penelitian yang digunakan berupa kualitatif deskriptif, dimana penelitian ini berupaya untuk memperoleh informasi-informasi tentang penjaminan mutu pendidikan agama islam di sekolah dasar (studi multi kasus di Kota Semarang).

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: (1) Implementasi SPMI pada sekolah dasar di Kota Semarang sudah berjalan baik di sekolah model. Budaya penjaminan mutu juga tumbuh pada proses pembelajaran yang dilaksanakan oleh pendidik di sekolah model; (2) Faktor yang menjadi penghambat antara lain masih kurangnya pemahaman warga sekolah dalam melakukan evaluasi diri sekolah (EDS), kinerja dari TPMPS yang masih belum optimal, SDM yang terbatas, keterlibatan orang tua yang masih minim, dan belum adanya anggaran khusus untuk penjaminan mutu pendidikan di sekolah dasar. Sedangkan, Faktor pendukung dalam penjaminan mutu di sekolah dasar antara lain adanya komitmen yang tinggi untuk mewujudkan sekolah bermutu dari komponen sekolah, stakeholder yang peduli, serta sarana dan prasarana pembelajaran yang terpenuhi dan layak; (3) Model evaluasi penjaminan mutu pendidikan agama islam di sekolah dasar dari ketiga sekolah model SPMI yang diteliti antara lain SDN Wonotingal menggunakan *goal free evaluation model*, lalu SDN Dadapsari menggunakan *transactional evaluation model*, dan SDN Rejosari 01 menggunakan *goal oriented evaluation model*. Setiap model memiliki kelebihan dan kekurangan. Penggunaan model evaluasi berdasarkan pada situasi, kondisi, dan kebutuhan setiap satuan pendidikan.

Kata Kunci: Model Evaluasi, Penjaminanan Mutu, Pendidikan Agama Islam.

ABSTRACT

Wisnu, Andika. 2021. *Evaluation Model of Quality Assurance of Islamic Religious Education in Elementary Schools (Multi Case Study in Semarang City)*. Thesis Islamic Education Study Program (PAI), Postgraduate, Salatiga State Islamic Institute (IAIN). Counselor: Prof. Dr. Winarno, M.Pd.

This study aims to describe the implementation of the internal quality assurance system (SPMI), the inhibiting and supporting factors and the evaluation model of the quality assurance of Islamic religious education in elementary schools (multi case study in Semarang City). The type of research used is ethnomethodological research with a qualitative approach

Data collection techniques in this study were carried out through: (1) observation; (2) interviews, and; (3) documentation. Validated using data source triangulation techniques and data collection techniques.

The research method used is descriptive qualitative, where this study seeks to obtain information about quality assurance of Islamic religious education in elementary schools (multi case study in Semarang City).

The results of this study indicate that: (1) The implementation of SPMI in elementary schools in the city of Semarang has gone well in model schools. Quality assurance culture also grows in the learning process carried out by educators in model schools; (2) The inhibiting factors include the lack of understanding of school residents in conducting school self-evaluation (EDS), the performance of the TPMPS that is still not optimal, limited human resources, minimal parental involvement, and the absence of a special budget for education quality assurance. in elementary school. Meanwhile, supporting factors in quality assurance in elementary schools include a high commitment to realizing quality schools from school components, stakeholders who care, and learning facilities and infrastructure that are fulfilled and proper; (3) The evaluation model for the quality assurance of Islamic religious education in elementary schools from the three SPMI model schools studied included SDN Wonotingal using the goal free evaluation model, then SDN Dadapsari using the transactional evaluation model, and SDN Rejosari 01 using the goal oriented evaluation model. Each model has advantages and disadvantages. The use of the evaluation model is based on the situation, conditions, and needs of each educational unit.

Keywords: Evaluation Model, Quality Assurance, Islamic Religious Education.

PRAKATA

Segala puji bagi Allah Swt. Tuhan semesta alam, yang telah melimpahkan taufik, rahmat, dan hidayah-Nya kepada penulis, sehingga tesis ini dapat terselesaikan. Salawat serta salam tetap tercurah kepada Rasulullah Muhammad Saw., keluarga, sahabat-sahabat dan para pengikutnya yang selalu meneladaninya hingga hari akhir yang telah dijanjikan.

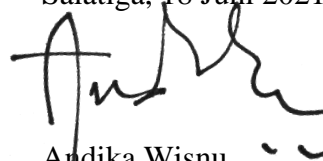
Tesis yang berjudul Model Evaluasi Penjaminan Mutu Pendidikan Agama Islam di Sekolah Dasar (Studi Multi Kasus di Kota Semarang) ini disusun untuk memberikan kontribusi di bidang keilmuan. Tesis ini tidak dapat terselesaikan dengan lancar tanpa dukungan, bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak. Oleh sebab itu, dengan penuh rasa hormat dan kerendahan hati, penulis menghaturkan terima kasih sedalam-dalamnya kepada:

1. Rektor IAIN Salatiga, Prof. Dr. Zakiyuddin Baidhawiy, M.Ag.;
2. Direktur Pascasarjana IAIN Salatiga, Prof. Dr. Phil. Widiyanto, M.A.;
3. Ketua Program Studi Pascasarjana Pendidikan Agama Islam IAIN Salatiga, Dr. Ruwandi, M.A, yang telah memberikan bimbingan dan arahan kepada penulis dalam penyelesaian tesis ini;
4. Prof. Dr. Winarno, M.Pd. selaku dosen pembimbing tesis yang senantiasa memberikan bimbingan dan kemudahan kepada penulis dalam penyusunan tesis ini, serta berkenan meluangkan waktunya sehingga tesis ini dapat terselesaikan;
5. Segenap Guru Besar, Dosen dan Staf Pascasarjana IAIN Salatiga;

6. Kepala SDN Wonotingal, Darsimah, S.Pd., M.Pd., Kepala SDN Dadapsari, Ainul Churotin, S.Pd., M.M., dan Kepala SDN Rejosari 01, Sulastri S.Pd., yang telah berkenan memberikan izin penelitian di instansi masing-masing;
7. Kedua Orangtuaku, kemudian Istriku, Lihar Raudina Izzati beserta anak-anakku Alfarezel Andika Juwandi dan Albirru Andika Juwandi yang selalu menjadikan penulis termotivasi untuk segera menyelesaikan tesis ini;
8. Rekan-rekan seperjuangan kelas B Pascasarjana Program Studi PAI angkatan 2017, yang selalu memberikan semangat satu dengan lainnya; dan
9. Segenap pihak yang telah membantu terselesaikannya tesis ini yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Penulis menyadari sepenuhnya, bahwa tesis ini masih jauh dari sempurna, oleh karena itu, saran, dan kritik yang membangun sangat penulis harapkan. Semoga tesis ini bisa memberikan manfaat kepada penulis pada khususnya, dan bagi para pembaca pada umumnya, Aamiin.

Salatiga, 18 Juni 2021



Andika Wisnu
NIM. 12010170030

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN	iii
MOTTO	iv
ABSTRAK.....	v
PRAKATA.....	vii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR GAMBAR	xi
DAFTAR LAMPIRAN.....	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Signifikansi Penelitian	7
D. Tinjauan Pustaka	8
E. Metode Penelitian.....	20
F. Sistematika Penulisan	25
BAB II IMPLEMENTASI SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL PADA SEKOLAH DASAR DI KOTA SEMARANG	24
A. Temuan Hasil Penelitian Tentang Implementasi Sistem Penjaminan Mutu Internal di Kota Semarang	26
B. Pembahasan Hasil Penelitian Tentang Implementasi Sistem Penjaminan Mutu Internal di Kota Semarang.....	60
BAB III FAKTOR PENGHAMBAT DAN FAKTOR PENDUKUNG PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN PADA SEKOLAH DASAR DI KOTA SEMARANG	65
A. Temuan Hasil Penelitian Tentang Faktor Penghambat dan Faktor Pendukung Penjaminan Mutu Pendidikan Pada Sekolah Dasar di Kota Semarang	60

B. Pembahasan Hasil Penelitian Tentang Faktor Penghambat dan Faktor Pendukung Penjaminan Mutu Pendidikan Pada Sekolah Dasar di Kota Semarang	70
BAB IV MODEL EVALUASI PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN AGAMA ISLAM PADA SEKOLAH DASAR DI KOTA SEMARANG	74
A. Temuan Hasil Penelitian Tentang Model Evaluasi Penjaminan Mutu Pendidikan Agama Islam pada Sekolah Dasar di Kota Semarang.....	75
B. Pembahasan Hasil Penelitian Tentang Model Evaluasi Penjaminan Mutu Pendidikan Agama Islam pada Sekolah Dasar di Kota Semarang.....	83
BAB V PENUTUP	91
A. Simpulan	91
B. Saran	92
C. Keterbatasan Penelitian	94
DAFTAR PUSTAKA	95
LAMPIRAN	98
BIOGRAFI PENULIS	154

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
1.1. Skema Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan	16
2.1. Tampak Depan SDN Wonotingal	27
2.2. Rapor Mutu SDN Wonotingal	28
2.3. Tampak Depan SDN Dadapsari	31
2.4. Rapor Mutu SDN Dadapsari	31
2.5. Tampak Depan SDN Rejosari 01	34
2.6. Rapor Mutu SDN Rejosari 01	35

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran	Halaman
1. Pedoman Wawancara	99
2. Verbatim Wawancara.....	101
3. Triangulasi Sumber Data.....	114
4. Surat Permohonan Izin Penelitian	115
5. Profil SDN Wonotingal.....	118
6. Profil SDN Dadapsari	120
7. Profil SDN Rejosari 01	122
8. Rapor Mutu SDN Wonotingal	124
9. Rapor Mutu SDN Dadapsari	130
10. Rapor Mutu SDN Rejosari 01	136
11. Hasil Audit Mutu SDN Wonotingal.....	142
12. Hasil Audit Mutu SDN Dadapsari	145
13. Hasil Audit Mutu SDN Rejosari 01	148
14. Dokumentasi Wawancara	151
15. Nota Pembimbing	153
16. Biografi Penulis	154

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pada Pasal 3 menyebutkan bahwa pendidikan dilaksanakan melalui sebuah sistem pendidikan nasional guna mengusahakan tercapainya tujuan dari pendidikan nasional, yaitu untuk mengembangkan kemampuan, meningkatkan mutu kehidupan, serta mengangkat harkat martabat manusia Indonesia (Harmanto, dkk, 2019: 5).

Implikasi dari berlakunya undang-undang tersebut, kemudian terbitlah Peraturan pemerintah No. 19 Tahun 2005 Pasal 91 tentang Standar Nasional Pendidikan, berisi pernyataan bahwa setiap satuan pendidikan pada jalur formal dan non formal wajib melakukan penjaminan mutu pendidikan. Tujuan dari penjaminan mutu pendidikan tersebut tidak lain adalah terpenuhinya standar nasional Pendidikan.

Undang-undang serta Peraturan Pemerintah tersebut kemudian menjadi cikal bakal terbentuknya sebuah sistem penjaminan mutu pendidikan. Menurut Wahyuni & Murtadlo (2019: 3), Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan (SPMP) terdiri dari Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) yang dilaksanakan dalam satuan pendidikan dan dijalankan oleh seluruh komponen satuan pendidikan dan Sistem Penjaminan Mutu Eksternal (SPME) yang dilaksanakan oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, lembaga akreditasi dan lembaga standarisasi pendidikan.

Maksud penjaminan mutu, menurut Manghani (2011: 36) adalah meyakinkan ketercapaian mutu dengan suatu sistem kerja dan keterbukaan untuk keberhasilan suatu pekerjaan di setiap lini organisasi dengan melalui sistem pengendalian. Penjaminan mutu meyakinkan bahwa tindakan sistemik dilakukan diperoleh hasil kerja, didokumentasikan, dan dilaporkan sesuai persyaratan/ kriteria yang berlaku.

Mutu pendidikan hari ini cukup memprihatinkan, di masa pandemi covid-19 segala hal dalam upaya pemenuhan dan peningkatan mutu menjadi terhambat. Senada dengan hasil penelitian Widya Sari, Andi Muhammad Rifki, dan Mila Karmila (2020), yang menyebutkan bahwa implementasi kebijakan tentang pendidikan di masa pandemi covid-19 masih memiliki banyak kendala, selain itu peningkatan keberhasilan pembelajaran masih rendah dan tidak efektif.

Standar Nasional Pendidikan yang belum sepenuhnya terlaksana di setiap satuan pendidikan, menjadi sebuah masalah serius. Kondisi tersebut dapat tergambar dari hasil akreditasi maupun pemetaan mutu yang dilaksanakan pemerintah. Terdapat faktor yang menjadi kendala pemenuhan mutu sekolah, diantaranya belum terciptanya budaya mutu di sekolah. Untuk itu perlu upaya penumbuhan budaya mutu dalam peningkatan mutu di sekolah (Harmanto, dkk, 2019: 1).

Kondisi yang demikian memaksa satuan pendidikan berkewajiban untuk tetap menghasilkan kompetensi lulusan yang bermutu. Uchtiawati & Zawawi (2014: 52) juga berpendapat bahwa lembaga pendidikan

seharusnya menetapkan standar mutu yang tidak hanya dinyatakan pada pengakuan terakreditasi, tetapi juga harus dilengkapi dengan suatu mekanisme yang jelas dalam menjamin mutu pendidikan di satuan pendidikan.

Senada dengan pernyataan Zahroh dan Maunah (2015: 8), mutu dalam pendidikan memang dititik tekankan pada peserta didik dan proses yang ada di dalamnya. Tanpa adanya proses yang baik, maka sekolah yang bermutu juga akan mustahil untuk dicapai.

Implikasi dari dinamika penjaminan mutu pendidikan tersebut, sekolah sebagai lingkungan pendidikan memiliki peran sentral dalam mengembangkan potensi peserta didik, salah satunya yaitu melalui proses pembelajaran dari seluruh mata pelajaran yang telah ditentukan. Salah satunya adalah mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti. Dalam Permendiknas No 22 Tahun 2006, Tentang Standar Isi untuk Satuan Pendidikan Tingkat Dasar Dan Menengah, Pendidikan Agama Islam diharapkan mampu menghasilkan manusia yang selalu berupaya menyempurnakan iman, takwa, dan berakhlak mulia, akhlak mulia mencakup etika, budi pekerti, atau moral sebagai perwujudan dari pendidikan (Ainiyah, 2013: 26).

Pembelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti bukanlah mata pelajaran pelengkap mata pelajaran lainnya, namun lebih daripada itu, dengan pembelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti di sekolah, diharapkan peserta didik menjadi peserta didik yang berkepribadian yang

jujur, bertanggung jawab, dan berakhlak mulia (Budi, Rahmat, & Kosasih, 2015: 193).

Sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang perubahan kedua Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan (LPMP) memiliki peran penting memfasilitasi sekolah dalam pelaksanaan penjaminan mutu (Harmanto, dkk, 2019: 1).

LPMP Jawa Tengah pada tahun 2019 melaksanakan bimbingan teknis tentang SPMI untuk sekolah model yang tersebar pada 16 Kecamatan yang ada di Kota Semarang. dalam penelitian ini, peneliti perlu melihat bagaimana program SPMI tersebut berjalan pada satuan pendidikan dan model evaluasi seperti apa yang digunakan untuk mengevaluasi program pembelajaran, yang kemudian titik fokusnya adalah pada proses pembelajaran, khususnya proses pembelajaran mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti.

Evaluasi suatu program pendidikan harus dilakukan secara sistematis, maka diperlukan model evaluasi implementasi standar mutu pendidikan yang dilaksanakan pada satuan pendidikan. Model-model evaluasi program menurut Arikunto dan Jabar (2009), secara garis besar terdiri dari (1) Model Tayler, (2) Model Teoritik Tayler dan Maguire, (3) Model Pendekatan Sistem Alkin (4) Model Countenance Stake, (5) Model CIPP (*Context, Input, Process, dan Product*). Menurut Arikunto dalam Ananda dan Rafida (2017), evaluasi program adalah kegiatan yang

dimaksudkan untuk mengetahui seberapa tinggi tingkat keberhasilan dari kegiatan yang direncanakan.

Model evaluasi penjaminan mutu pendidikan agama islam di sekolah dasar yang hendak diteliti, diidentifikasi menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian etnometodologi. Menurut Subadi (2006: 46), etnometodologi membebaskan situasi atau realitas sosial untuk berbicara tentang dirinya sendiri. dan tugas peneliti cukup menyimak dan melukiskan apa yang terjadi. Secara umum, peneliti melihat secara alami bagaimana jalannya penjaminan mutu pendidikan agama islam di sekolah dasar, kemudian menganalisisnya berdasarkan data dan fakta yang ada di lapangan.

Berdasarkan latar belakang tersebut, peneliti mengambil judul “Model Evaluasi Penjaminan Mutu Pendidikan Agama Islam di Sekolah Dasar (Studi Multi Kasus di Kota Semarang)”.

B. Rumusan Masalah

1. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, teridentifikasi masalah sebagai berikut:

- a. Peraturan-peraturan tentang sistem penjaminan mutu pendidikan sudah ada, namun belum terealisasi secara menyeluruh di satuan pendidikan;
- b. Bimbingan teknis implementasi Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) pada satuan pendidikan sudah dilaksanakan, namun

pelaksanaan oleh satuan pendidikan belum sesuai dengan standar yang diharapkan;

- c. Proses Pembelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti menjadi salah satu komponen yang berperan menjamin mutu lulusan di satuan pendidikan, namun keadaan di tengah pandemi menjadikan proses pembelajaran terhambat.

2. Pembatasan Masalah

Objek penelitiannya adalah model evaluasi penjaminan mutu pendidikan agama islam di sekolah dasar (studi multi kasus di kota semarang), lokasi penelitian: Kota Semarang, khususnya pada sekolah model SPMI yang mengikuti bimbingan teknis pada tahun 2019. waktu penelitiannya adalah tahun 2021.

3. Fokus Masalah

Berdasarkan latar belakang yang ada, maka rumusan masalahnya adalah sebagai berikut:

- a. Bagaimana implementasi sistem penjaminan mutu internal pada sekolah dasar di Kota Semarang?
- b. Apa saja faktor penghambat dan faktor pendukung penjaminan mutu pendidikan pada sekolah dasar di Kota Semarang?
- c. Bagaimana model evaluasi penjaminan mutu pendidikan agama islam pada sekolah dasar di Kota Semarang?

C. Signifikansi Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan di atas, maka tujuan diadakannya penelitian ini adalah untuk mengetahui:

- a. Implementasi sistem penjaminan mutu internal pada sekolah dasar di Kota Semarang;
- b. Faktor penghambat dan faktor pendukung penjaminan mutu pendidikan pada sekolah dasar di Kota Semarang;
- c. Model evaluasi penjaminan mutu pendidikan agama islam pada sekolah dasar di Kota Semarang.

2. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian yang hendak dicapai, maka penelitian ini diharapkan mempunyai manfaat dalam pendidikan baik secara langsung maupun tidak langsung. Adapun manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut.

- a. Manfaat Teoretis
 - 1) Dapat memberikan sumbangsih pemikiran tentang kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan penjaminan mutu pendidikan di Indonesia;
 - 2) Sebagai bahan rujukan untuk penelitian-penelitian selanjutnya yang berhubungan dengan penjaminan mutu pendidikan pada satuan pendidikan;

3) Sebagai referensi jenis-jenis penelitian etnometodologi selanjutnya yang berhubungan dengan penjaminan mutu pembelajaran pendidikan agama Islam di sekolah dasar.

b. Manfaat Praktis

1) Bagi penulis

Dapat menambah pengalaman penulis dalam melakukan penelitian yang berjenis penelitian etnometodologi;

2) Bagi Satuan Pendidikan

Dapat menjadikan hasil penelitian ini sebagai bahan referensi untuk memenuhi dan meningkatkan mutu pendidikan di sekolah;

3) Bagi Dinas Pendidikan dan Lembaga Penjamin Mutu Pendidikan

Hasil penelitian ini dapat menjadi bahan evaluasi dari implementasi sistem penjaminan mutu internal yang dilaksanakan di satuan pendidikan.

D. Tinjauan Pustaka

1. Penelitian Terdahulu

Neng Gustini dan Yolanda Mauly (2019) dalam penelitiannya mengemukakan bahwa Pemetaan mutu dilakukan dengan menganalisis raport mutu sekolah atau dinamakan dengan Evaluasi Diri Sekolah (EDS), untuk mengetahui sejauh mana perkembangan sekolah sebelum diterapkannya SPMI. Perencanaan peningkatan mutu dirumuskan oleh

seluruh Tim Pengembang Mutu Sekolah (TPMS) dengan bimbingan Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan (LPMP). Persamaan dengan penelitian ini adalah sama-sama membahas tentang Sistem Penjaminan Mutu Internal. Perbedaannya adalah penelitian tersebut tidak model meneliti model evaluasi penjaminan mutu pembelajaran PAI dan Budi Pekerti.

Deni Trianto (2020) dalam penelitiannya mengemukakan Evaluasi pelaksanaan standar dalam Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) yang terdapat di STT Bethel Indonesia sudah terlaksana namun masih belum maksimal, standar dalam bidang penelitian cukup terlaksana namun harus ada perbaikan, dan standar dalam bidang pengabdian kepada masyarakat (PKM) cukup terlaksana namun harus ada perbaikan. Persamaan dengan penelitian ini adalah sama-sama mengevaluasi SPMI. Perbedaannya adalah objek penelitiannya adalah perguruan tinggi, sedangkan penelitian ini fokus model penjaminan mutu pendidikan agama islam di sekolah dasar.

Dedeh Rahwati (2019) dalam penelitiannya mengemukakan bahwa implementasi sistem penjaminan mutu pendidikan dalam meningkatkan mutu sekolah belum terlaksana dengan baik hal ini dikarenakan kurangnya keterlibatan seluruh stakeholder pendidikan dalam mendukung perencanaan penyusunan mutu serta kurangnya dukungan anggaran yang memadai dalam penyusunan atau pemetaan mutu. Persamaan dengan penelitian ini adalah sama-sama membahas tentang

Evaluasi Sistem Penjaminan Mutu Internal di sekolah. Perbedaannya adalah penelitian tersebut tidak menganalisis tentang model evaluasi penjaminan mutu pembelajaran PAI dan Budi Pekerti.

M. Ridlwan (2010) dalam penelitiannya mengemukakan bahwa Penjaminan mutu adalah seluruh kegiatan yang ditempuh oleh perguruan tinggi agar dapat menyelenggarakan pendidikan tinggi yang berkarakter khusus, memiliki keunggulan serta sesuai dengan maksud didirikannya perguruan tinggi. Ada banyak alternatif pilihan terkait dengan sistem dan model penjaminan mutu akademik yang dapat diterapkan di perguruan tinggi. Persamaan dengan penelitian ini adalah sama-sama membahas tentang Sistem dalam Penjaminan Mutu. Perbedaannya adalah penelitian tersebut tidak membahas tentang model penjaminan mutu pendidikan agama islam di sekolah dasar dan hanya fokus pada perguruan tinggi.

Ni Made Suciani, Mala Sondang Silitonga, dan Madrikan (2019), dalam penelitiannya berkesimpulan bahwa implementasi program SPMI di sekolah model terdapat peningkatan partisipasi masyarakat, peningkatan partisipasi masyarakat sekolah dan kompetensi guru yang cukup efektif. Persamaan dengan penelitian ini adalah sama-sama mengevaluasi implementasi SPMI Perbedaannya adalah penelitian tersebut tidak mengidentifikasi model evaluasi penjaminan mutu pembelajaran PAI dan Budi Pekerti.

Jakaria Umro (2016) dalam penelitiannya menunjukkan bahwa pengembangan pendidikan dimulai dari perbaikan kurikulum, dikembangkan melalui bahan ajar, dituangkan ke rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP), menyiasati waktu yang tersedia, evaluasi, penguasaan konsep dan aktualisasi bersama pada semua komponen sekolah, maka ketiga ranah baik dari kognitif, afektif dan psikomotor yang diharapkan dapat terpenuhi. Persamaan dengan penelitian ini adalah sama-sama membahas tentang mengembangkan mutu pendidikan. Perbedaannya adalah penelitian tersebut tidak mengidentifikasi model evaluasi penjaminan mutu pendidikan khususnya pendidikan agama islam yang ada di satuan pendidikan.

Rizki Susanto (2016) dalam penelitiannya menyatakan bahwa proses pembelajaran intrakurikuler dilaksanakan dengan 4 tahapan, dari mulai perencanaan pembelajaran, pelaksanaan pembelajaran, evaluasi pembelajaran, dan pengawasan pembelajaran. Persamaan dengan penelitian ini adalah sama-sama membahas tentang mutu pembelajaran PAI dan Budi Pekerti. Perbedaannya adalah penelitian tersebut tidak model penjaminan mutu pendidikan agama islam di sekolah dasar.

Siti Aini Latifah (2012) dalam penelitiannya mengemukakan bahwa proses pembelajaran Pendidikan Agama Islam di SMP Assalam berjalan dengan baik, namun masih ada kendala yang sering muncul sehingga terkesan adanya tidak konsisten dalam proses pembelajaran yang dilaksanakan oleh guru. Persamaan dengan penelitian ini adalah sama-

sama membahas tentang pemenuhan standar pembelajaran PAI dan Budi Pekerti. Perbedaannya adalah penelitian tersebut tidak membahas model penjaminan mutu pendidikan agama islam di sekolah dasar.

I Made Pater, I Made Yudana, dan Nyoman Natajaya (2020) dalam penelitiannya kendala yang menjadi penghambat pelaksanaan implementasi SPMI di SMKN 3 Singaraja adalah belum adanya alokasi dana pasti untuk pelaksanaan PPEPP SPMI yang dikelola mandiri oleh TPMPS dan belum adanya ruang, alat, serta bahan pendukung pelaksanaan PPEPP. Persamaan dengan penelitian ini adalah sama-sama mengevaluasi implementasi SPMI. Perbedaannya adalah penelitian tersebut tidak mengevaluasi Penjaminan Mutu Pendidikan khususnya pembelajaran pendidikan agama islam yang ada di satuan pendidikan.

Dari beberapa penelitian terdahulu tersebut, secara umum memang memiliki kesamaan dalam penelitian ini, namun secara khusus, penelitian ini memiliki keunikan yang belum ada pada penelitian-penelitian terdahulu, yaitu jenis penelitian ini adalah etnometodologi untuk mengidentifikasi model evaluasi dari sistem penjaminan mutu internal pada umumnya dan penjaminan mutu pada proses pembelajaran pendidikan agama Islam di sekolah dasar pada khususnya.

2. Kerangka Teori

a. Model Evaluasi Program

Menurut Briekerhoff dalam Ananda dan Rafida (2017), mendefinisikan evaluasi program adalah suatu proses menemukan

sejauhmana tujuan dan sasaran program atau proyek telah terealisasi, memberikan informasi untuk pengambilan keputusan, membandingkan kinerja dengan standar atau patokan untuk mengetahui adanya kesenjangan, penilaian harga dan kualitas dan penyelidikan sistematis tentang nilai atau kualitas suatu objek.

Dilihat dari tujuan evaluasi, tujuannya adalah untuk memperoleh informasi yang akurat dan obyektif tentang suatu program. Informasi tersebut dapat berupa proses pelaksanaan program, dampak/hasil yang dicapai, efisiensi, serta pemanfaatan hasil evaluasi yang difokuskan untuk program itu sendiri, yaitu untuk mengambil keputusan apakah dilanjutkan, diperbaiki, atau dihentikan. Selain itu, juga dipergunakan untuk kepentingan penyusunan program berikutnya maupun penyusunan kebijakan yang terkait dengan program (Ananda dan Rafida, 2017: 10). Berdasarkan keterangan tersebut, dapat disimpulkan bahwa evaluasi program bertujuan untuk mengetahui sejauh mana tujuan program telah tercapai. Selanjutnya, hasil evaluasi program digunakan sebagai dasar untuk program tindak lanjut.

Issac dan Michael dalam Ananda dan Rafida (2017: 36) mengklasifikasikan 6 (enam) model evaluasi program dengan pendekatan dan tujuan yang berbeda antara masing-masing model, antara lain:

- 1) Goal oriented evaluation model, yaitu jenis evaluasi yang dilakukan secara berkesinambungan dan kontiniu serta bertujuan untuk menilai sejauhmana program telah tercapai;
- 2) Decision oriented evaluation model, yaitu evaluasi yang diorientasikan untuk memberikan masukan dan pertimbangan dalam pengambilan keputusan;
- 3) Transactional evaluation model, yaitu evaluasi yang ditujukan untuk menggambarkan proses program dan perspektif nilai dari tokoh-tokoh penting dalam masyarakat;
- 4) Evaluation research model, yaitu evaluasi yang dilakukan untuk menjelaskan pengaruh kependidikan dan pertimbangan strategi pembelajaran;
- 5) Goal-free evaluation model, yaitu evaluasi yang tidak mengacu pada tujuan program, namun fokus mengevaluasi pengaruh program baik yang diharapkan maupun yang tidak diharapkan namun terjadi;
- 6) Adversary evaluation model, yaitu evaluasi yang bertujuan mengumpulkan kasus-kasus menonjol untuk diinterpretasi nilai program dari dua sisi dengan menggunakan informasi yang sama tentang program.

Terkait dengan evaluasi program pembelajaran, komponen-komponen yang menjadi faktor penting keberlangsungannya adalah pendidik atau guru dilihat kompetensinya, peserta didik, materi/kurikulum yang diajarkan, sarana dan prasarana sekolah, pengelolaan pembelajaran, dan lingkungan peserta didik, baik lingkungan keluarga maupun lingkungan masyarakatnya (Arikunto dan Jabar, 2009: 12). Maka yang menjadi titik fokus dalam penelitian ini adalah data dan fakta mengenai komponen-komponen penting pembelajaran yang telah diuraikan tersebut, serta mengklasifikasikan model evaluasi apa yang digunakan dalam penjaminan mutu pendidikan agama islam di sekolah dasar khususnya di Kota Semarang.

b. Sistem Penjaminan Mutu Internal

Menurut Jamaluddin & Sopiah dalam Gustini & Mauly (2019: 233) Sistem penjaminan mutu yang berjalan di dalam sekolah disebut sebagai Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI). SPMI mencakup seluruh aspek penyelenggaraan pendidikan dengan memanfaatkan berbagai sumberdaya untuk mencapai Standar Nasional Pendidikan (SNP).

SPMI dievaluasi dan dikembangkan secara berkelanjutan oleh satuan pendidikan dan juga ditetapkan oleh satuan pendidikan untuk dituangkan dalam pedoman pengelolaan satuan pendidikan serta disosialisasikan kepada pemangku kepentingan satuan pendidikan (Jamaluddin dan Sopiah, 2017: 100).

SPMI memiliki peran sebagai sistem peringatan dini sebuah masalah (Sarmono, Supriyanto, & Timan, 2020: 38). Dengan adanya sistem penjaminan mutu internal, masalah yang terdeteksi dapat segera tertangani serta tidak menjadikan masalah semakin besar yang kemudian menjadi sulit untuk diselesaikan oleh satuan Pendidikan.



Gambar 1.1. Skema Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan

Berdasarkan Permendikbud Nomor 28 Tahun 2016 tersebut, menurut Harmanto, dkk (2019: 53), Implementasi SPMI terdiri dari lima langkah kegiatan, yaitu:

- 1) Pemetaan mutu pendidikan yang dilaksanakan oleh satuan pendidikan berdasarkan standar nasional pendidikan;
- 2) Pembuatan rencana peningkatan mutu yang dituangkan dalam Rencana Kerja Sekolah (RKS);
- 3) Melaksanakan pemenuhan mutu baik dalam pengelolaan satuan pendidikan maupun proses pembelajaran;
- 4) Monitoring dan evaluasi proses pelaksanaan pemenuhan mutu yang telah dilakukan;

- 5) Menetapkan standar baru dan penyusunan strategi peningkatan mutu berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi.

Agar pelaksanaan SPMI dapat dilakukan oleh seluruh satuan pendidikan dengan optimal, perlu dikembangkan satuan pendidikan yang akan menjadi model penerapan penjaminan mutu pendidikan secara mandiri, yang selanjutnya disebut sekolah model (Jamaluddin dan Sopiah, 2017: 100). Sekolah Model adalah sekolah yang ditetapkan dan dibina oleh Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan (LPMP) untuk menjadi sekolah acuan bagi sekolah lain disekitarnya dalam penerapan penjaminan mutu pendidikan secara mandiri.

Sekolah model dipilih dari sekolah yang belum atau yang sudah memenuhi Standar Nasional Pendidikan (SNP) penentuan sekolah ini bertujuan untuk mengetahui progres sekolah yang bersangkutan kedepannya apakah sekolah akan mengalami peningkatan dari sebelumnya.

Dapat disimpulkan bahwa implementasi dari SPMI yang baik tentu akan memberikan dampak positif bagi satuan pendidikan, beberapa diantaranya adalah meningkatnya prestasi peserta didik, meningkatnya prestasi sekolah, serta utamanya ialah meningkatnya kualitas lulusan dari satuan pendidikan.

c. Proses Pembelajaran Pendidikan Agama Islam di Sekolah Dasar

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 22 Tahun 2016 Tentang Standar Proses, menjelaskan bahwa proses pembelajaran pada satuan pendidikan diselenggarakan secara interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, memotivasi peserta didik untuk berpartisipasi aktif, serta memberikan ruang yang cukup bagi prakarsa, kreativitas, dan kemandirian sesuai dengan bakat, minat, dan perkembangan fisik serta psikologis peserta didik (Harmanto, dkk, 2019: 111).

Berdasarkan Permendikbud tersebut maka diharapkan setiap satuan pendidikan dapat melakukan perencanaan pembelajaran, pelaksanaan proses pembelajaran serta penilaian proses pembelajaran untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas ketercapaian kompetensi lulusan.

Proses pembelajaran sepenuhnya diarahkan pada pengembangan ranah afektif, kognitif, dan psikomotorik secara utuh/holistik. Artinya pengembangan ranah yang satu tidak bisa dipisahkan dengan ranah lainnya (Harmanto, dkk, 2019: 114).

Menurut Djamarah (2000: 37), dalam proses belajar mengajar, pendidik merupakan salah satu sumber belajar siswa yang memiliki peranan yang sangat penting dalam menentukan jalannya proses belajar mengajar. Kemudian, pendidikan agama sendiri

merupakan usaha memperkuat keimanan kepada Tuhan Yang Maha Esa peserta didik sesuai dengan agama yang dianutnya (Muhaimin, 2012: 75). Yaitu dengan tetap menghormati agama lain dalam rangka menjaga kerukunan antar umat beragama.

Pendidikan Agama Islam adalah usaha untuk memperkuat iman dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, sesuai dengan ajaran Islam (Amiruddin, dkk, 2006: 1). Kemudian, Heri Gunawan (2013: 201), menjelaskan lebih rinci, yaitu Pendidikan agama Islam adalah proses mempersiapkan manusia supaya hidup dengan sempurna dan bahagia, mencintai tanah air, dan tegap jasmaninya, sempurna budi pekertinya, teratur pikirannya, halus perasaannya, mahir dalam pekerjaannya, manis tutur katanya, baik dengan lisan maupun tulisan.

Menurut Ahmadi (2004: 63), tujuan Pendidikan Islam sejalan dengan tujuan hidup manusia dan perannya sebagai makhluk Allah Swt., yaitu semata-mata beribadah kepadanya.

Sebagaimana firman Allah Swt. dalam Al-Qur'an Surah Az-Zariyat ayat 56:

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ

Artinya: Aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah kepada-Ku.

Dapat disimpulkan bahwa, Pendidikan Agama Islam dalam penelitian ini merujuk pada proses pembelajaran mata pelajaran pendidikan agama islam, yaitu mulai dari perencanaan pembelajaran, pelaksanaan pembelajaran, serta penilaian pembelajaran pada satuan pendidikan.

E. Metode Penelitian

1. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Penelitian dengan pendekatan kualitatif melakukan proses eksplorasi dan memahami makna perilaku individu dan kelompok, menggambarkan masalah sosial atau masalah kemanusiaan (Sugiyono, 2014: 347).

Jenis penelitiannya adalah etnometodologi. Menurut Subadi (2006: 44) etnometodologi merupakan metode penelitian yang mempelajari bagaimana perilaku sosial dapat dideskripsikan sebagaimana adanya. Istilah etnometodologi dikemukakan oleh Harold Garfinkel. Etnometodologi berupaya untuk memahami bagaimana masyarakat memandang, menjelaskan dan menggambarkan kata hidup mereka sendiri.

Latar belakang penggunaan jenis penelitian etnometodologi dalam penelitian ini adalah karena dalam pelaksanaan penjaminan mutu di satuan pendidikan maupun pada pembelajaran menurut peneliti tidak

bisa diukur dengan kuantifikasi. Penjaminan mutu merupakan fenomena sosial, dengan banyak komponen di dalamnya.

Etnometodologi sendiri berbicara tentang bagaimana individu menciptakan dan memahami kehidupan mereka sehari-hari, seperti cara mereka menyelesaikan pekerjaan di dalam hidup sehari-hari. (Subadi, 2006: 44). Fokus kajian dari etnometodologi bukan hanya “orang” sebagai kediriannya yang tunggal, namun sebagai anggota atau bagian dari sebuah struktur lebih luas entah itu masyarakat atau bentuk yang lain. Etnometodologi juga berupaya memahami bagaimana cara orang memandang, menjelaskan, dan mendeskripsikan tatanan di dunia tempat mereka hidup (Subadi, 2006: 45).

Bila dikaitkan dalam penelitian ini, maka dapat diartikan dalam satuan pendidikan, bagaimana kepala sekolah dan guru pendidikan agama islam memandang, menjelaskan, dan mendeskripsikan penjaminan mutu berlangsung di sekolah bagi kepala sekolah, dan bagaimana penjaminan mutu berlangsung pada pembelajaran bagi guru pendidikan agama islam.

2. Subjek Penelitian

Subjek dalam penelitian ini adalah Kepala Sekolah dan Guru Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti Sekolah Model di Kota Semarang, dalam penelitian ini, peneliti memilih beberapa sekolah model, yaitu SDN Wonotingal Kecamatan Candisari, SDN Dadapsari

Kecamatan Semarang Utara, dan SDN Rejosari 01 Kecamatan Semarang Timur.

Latar belakang pemilihan ketiga sekolah tersebut adalah dari keragaman hasil monitoring dan evaluasi LPMP Jawa Tengah yang dilihat melalui <https://hasilauditmutu.lpmpjateng.go.id/index.php>. Menunjukkan SDN Wonotingal Kecamatan Candisari memiliki hasil 98% memenuhi SNP, SDN Dadapsari Kecamatan Semarang Utara 100% memenuhi SNP, dan SDN Rejosari 01 Kecamatan Semarang Timur 90% memenuhi SNP. Serta dari segi geografispun bervariasi, Kecamatan Candisari, berada di bagian atas Kota Semarang, Kecamatan Semarang Utara yang berada di “*pinggiran*” atau pesisir laut. Memiliki kecenderungan jauh dari hiruk pikuk perkotaan. Kemudian, Semarang Timur yang tepat berada di tengah kota.

3. Teknik Pengumpulan Data

a. Observasi

Observasi sebagai teknik pengumpulan data mempunyai ciri yang spesifik bila dibandingkan dengan teknik yang lain, karena metode ini tidak terbatas pada orang saja tetapi juga pada objek-objek alam yang lain. Observasi yang digunakan peneliti adalah metode observasi partisipan, yaitu suatu proses pengamatan bagian dalam kehidupan orang-orang yang akan diobservasi (Margono, 2010: 161) Pada observasi ini peneliti terlibat langsung dan tidak

langsung dalam implementasi SPMI dan penjaminan mutu pendidikan agama Islam di sekolah dasar.

b. Wawancara (*Interview*)

Menurut Lexy J. Moleong, wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (*interviewer*) yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara (*interviewee*) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu (Moleong, 2007: 186).

Wawancara dalam jenis penelitian etnometodologi bukan hanya untuk mengetahui jawaban-jawaban terhadap pertanyaan. Namun aturan atau struktur yang membuat individu (orang) tersebut memproduksi tindakan-tindakan atau jawaban tersebut (Subadi, 2006: 47).

Wawancara yang digunakan adalah wawancara terstruktur. Wawancara terstruktur adalah wawancara yang menggunakan pedoman wawancara yang sudah tersusun secara sistematis dan lengkap untuk pengumpulan datanya. (Sugiyono, 2007: 197). Kemudian, dalam penelitian jenis etnometodologi, data bukan hanya hasil jawaban narasumber terhadap pertanyaan yang diajukan pewawancara, namun proses wawancara itu sendiri merupakan sebuah data yang harus dianalisa pula (Subadi, 2006: 44). Wawancara dalam penelitian ini, peneliti lakukan dalam jaringan maupun luar jaringan.

c. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Bentuk dokumentasi ini dapat berupa tulisan, gambar, atau angka. Dengan menggunakan metode dokumentasi ini dapat memperkuat data yang digunakan dalam penelitian ini, yakni untuk mengungkapkan data dan fakta tentang implementasi SPMI dan penjaminan mutu pendidikan agama islam di sekolah dasar.

4. Metode Analisis Data

Data yang diperoleh kemudian dianalisis melalui tiga tahapan kegiatan, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan (Sugiyono, 2014: 337). Langkah pertama setelah data dikumpulkan yaitu merangkum data, memilih hal-hal pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, mencari pola data, serta menyingkirkan data yang tidak diperlukan. Kedua, menyajikan data dengan menggunakan teks naratif, gambar, maupun angka. Langkah yang terakhir yaitu menarik kesimpulan dari seluruh data yang diperoleh tentang penjaminan mutu pendidikan agama islam di sekolah dasar.

5. Pengecekan Keabsahan Data

Data yang diperoleh menggunakan teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi kemudian diuji keabsahannya dengan menggunakan teknik triangulasi data. Yaitu menurut Ananda dan Rafida (2017: 157), informasi yang diperoleh dari beberapa sumber diperiksa silang, misalnya data wawancara informan satu dengan informan lainnya.

Antara data wawancara dengan observasi dan sebagainya. Hal ini dilakukan untuk mengecek kebenaran data dan sekaligus nantinya untuk mempertajam analisis peneliti terhadap berbagai sumber data. Dan triangulasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah triangulasi sumber data antara kepala sekolah dan guru serta teknik pengumpulan data antara data hasil observasi dengan data hasil wawancara.

F. Sistematika Penulisan

BAB I, pendahuluan, memuat latar belakang masalah, rumusan masalah, signifikansi penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II, memuat implementasi sistem penjaminan mutu internal pada sekolah dasar di Kota Semarang.

BAB III, memuat faktor penghambat dan faktor pendukung penjaminan mutu pendidikan pada sekolah dasar di Kota Semarang.

BAB IV, memuat model evaluasi penjaminan mutu pendidikan agama islam pada sekolah dasar di Kota Semarang.

BAB V, penutup yang berisikan simpulan dari pembahasan bab-bab sebelumnya dan saran.

BAB II

IMPLEMENTASI SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL PADA SEKOLAH DASAR DI KOTA SEMARANG

Kota Semarang adalah Ibukota Provinsi Jawa Tengah, tentu dalam bidang pendidikan memiliki posisi sentral sebagai daerah percontohan bagi kota atau kabupaten lain. dalam perkembangannya, capaian mutu pendidikan di Kota Semarang sendiri pada tahun 2020 berada pada angka 5,69 yang termasuk dalam kategori menuju SNP 4. Di setiap satuan pendidikan, fokus peningkatan mutu tertuju pada standar pendidikan yang masuk pada kategori menuju SNP 1 dan 2.

Terdapat beberapa kriteria dalam penetapan capaian standar nasional pendidikan yang tercantum pada rapor mutu, yang apabila menggunakan angka rata-rata capaian adalah sebagai berikut:

1. Menuju SNP 1, berkisar antara angka 0 – 2,04 bertanda warna merah, menunjukkan standar yang masih sangat rendah dan perlu peningkatan;
2. Menuju SNP 2, berkisar antara angka 2,05 – 3,7 bertanda warna oranye, menunjukkan standar yang masih rendah dan perlu peningkatan;
3. Menuju SNP 3, berkisar antara angka 3,71 – 5,06 bertanda warna hijau, menunjukkan standar yang cukup dan perlu peningkatan;
4. Menuju SNP 4, berkisar antara angka 5,07 – 6,66 bertanda warna biru, menunjukkan standar yang sudah tinggi untuk menuju standar nasional pendidikan dan perlu peningkatan;
5. Bertanda warna ungu, telah mencapai standar nasional pendidikan, yaitu berkisar antara angka 6,67 – 7.

Implementasi SPMI di Kota Semarang sendiri sudah dilaksanakan sejak tahun 2019 melalui bimtek SPMI yang diprakarsai LPMP Jawa Tengah, kemudian tersebarlah dalam 16 Kecamatan di Kota Semarang yang menjadi sekolah model SPMI yang mengimbaskan kepada sekolah imbas di wilayah daerah binaan masing-masing sekolah model. Dalam penelitian ini, peneliti mengambil sampel SDN Wonotingal, SDN Dadapsari, dan SDN Rejosari 01. Kemudian keterangan-keterangan diambil dari hasil wawancara peneliti kepada Darsimah, S.Pd., M.Pd. selaku Kepala SDN Wonotingal, Ainul Churotin, S.Pd., M.M. selaku Kepala SDN Dadapsari, dan Sulastri, S.Pd. selaku Kepala SDN Rejosari 01.

A. Temuan Hasil Penelitian Tentang Implementasi SPMI di Kota Semarang


1. Pemetaan mutu pendidikan yang dilaksanakan oleh satuan pendidikan berdasarkan standar nasional Pendidikan
 - a. SDN Wonotingal



Gambar 2.1. Tampak Depan SDN Wonotingal

SDN Wonotingal adalah salah satu sekolah dasar negeri di Kota Semarang, tepatnya di Kecamatan Candisari. Berdasarkan

hasil rapor mutu di tahun 2020, SDN Wonotingal dilihat dari capaian tiap standar nasional pendidikan, memiliki nilai rata-rata capaian 5,85 yang termasuk dalam kategori menuju SNP 4.

 RAPOR MUTU 2020 DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI, PENDIDIKAN DASAR DAN PENDIDIKAN MENENGAH KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN									
IDENTITAS									
Nama Sekolah	SD NEGERI WONOTINGAL								
NPSN	20328619								
Kabupaten	Kota Semarang								
Provinsi	Prov. Jawa Tengah								
	2016	2017	2018	2019	2020				
Capaian Sekolah	4,99	5,72	5,41	6,53	5,85				
Capaian Kabupaten/Kota	4,79	5,42	5,52	6,4	5,69				
Capaian Provinsi	4,66	5,48	5,58	6,39	5,62				
Capaian Nasional	4,34	5,13	5,51	6,38	5,55				
CAPAIAN PER STANDAR									
Nomor	Standar Nasional Pendidikan	Capaian 2016	Capaian 2017	Capaian 2018	Capaian 2019	Capaian 2020	Kota Semarang 2020	Prov. Jawa Tengah 2020	Nasional 2020
1	Standar Kompetensi Lulusan	6,66	6,47	6,5	6,99	5,87	6,09	5,86	5,83
2	Standar Isi	4,92	5,68	5,32	6,96	5,62	5,69	5,61	5,57
3	Standar Proses	5,69	6,65	6,46	6,99	5,68	5,43	5,34	5,25
4	Standar Penilaian Pendidikan	4,06	6,32	5,25	6,99	6,42	6,26	6,21	6,17
5	Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan	4,96	3,87	4,79	6,22	6,6	5,85	5,97	5,9
6	Standar Sarana dan Prasarana Pendidikan	3,52	4,64	3,06	4,21	4,79	4,48	4,5	4,45
7	Standar Pengelolaan Pendidikan	5,93	6,13	5,84	6,92	6,05	6,01	5,8	5,71
8	Standar Pembiayaan	4,19	6,03	6,09	6,99	5,74	5,72	5,68	5,51
KATEGORI CAPAIAN									
Kategori	Batas Bawah	Batas Atas							
* Menuju SNP 1	0	2,04							
** Menuju SNP 2	2,05	3,7							
*** Menuju SNP 3	3,71	5,06							
**** Menuju SNP 4	5,07	6,66							
***** SNP	6,67	7							

Gambar 2.2. Rapor Mutu SDN Wonotingal

Secara spesifik, pemetaan mutu dari hasil capaian rapor mutu SDN Wonotingal adalah sebagai berikut:

1) Standar kompetensi lulusan

Standar kompetensi lulusan dengan nilai rata-rata 5,87 termasuk kategori menuju SNP 4. Maka mutu yang diharapkan sudah terpenuhi, meskipun belum mencapai SNP.

2) Standar isi

Standar isi memiliki nilai rata-rata 5,62 termasuk kategori menuju SNP 4. Namun pada aspek menyediakan alokasi waktu

pembelajaran sesuai struktur kurikulum yang berlaku memiliki nilai 3,34 yang berarti perlunya perhatian untuk ditangani.

3) Standar proses

Standar proses sendiri memiliki nilai rata-rata 5,68 termasuk kategori menuju SNP 4. Namun pada aspek mendapatkan evaluasi dari kepala sekolah dan pengawas sekolah memiliki nilai 2,07. Nilai yang terbilang rendah.

4) Standar penilaian pendidikan

Standar penilaian pendidikan dengan nilai rata-rata 6,42 termasuk kategori menuju SNP 4. Maka mutu yang diharapkan sudah terpenuhi, meskipun belum mencapai SNP.

5) Standar pendidik dan tenaga kependidikan

Standar pendidik dan tenaga kependidikan memiliki nilai rata-rata 6,6 termasuk kategori menuju SNP 4. namun pada aspek mendapatkan tersedia kepala tenaga laboratorium berpengalaman sesuai dan memiliki kepala tenaga pustakawan berpengalaman sesuai memiliki nilai 1,4. Nilai yang sangat rendah dan perlu perhatian yang sangat serius dari satuan pendidikan.

6) Standar sarana dan prasarana pendidikan

Standar sarana dan prasarana di SDN Wonotingal mendapatkan nilai rata-rata 4,79 termasuk menuju SNP 3, yang menjadi perhatian adalah pada aspek memiliki kapasitas

rombongan belajar yang sesuai dan memadai dengan nilai 1,17, lalu memiliki ragam prasarana sesuai ketentuan dengan nilai 1,43, dan memiliki laboratorium IPA sesuai standar dengan nilai 3,36. Kemudian aspek memiliki ruang sirkulasi sesuai standar, memiliki ruang tata usaha sesuai standar, memiliki ruang konseling sesuai standar, memiliki ruang organisasi kesiswaan sesuai standar, kondisi ruang tata usaha layak pakai, kondisi ruang konseling layak pakai, kondisi ruang organisasi kesiswaan layak pakai memiliki nilai 1.

7) Standar pengelolaan pendidikan

Standar pengelolaan pendidikan memiliki nilai rata-rata 6,05 termasuk menuju SNP 4, namun pada aspek meningkatkan dayaguna pendidik dan tenaga kependidikan masih pada angka 2,98 serta pada aspek melaksanakan pengelolaan bidang kurikulum dan kegiatan pembelajaran pada angka 2,94.

8) Standar pembiayaan


Standar pembiayaan dengan nilai rata-rata 5,74 termasuk kategori menuju SNP 4. Maka mutu yang diharapkan sudah terpenuhi, meskipun belum mencapai SNP.

b. SDN Dadapsari



Gambar 2.3. Tampak Depan SDN Dadapsari

SDN Dadapsari adalah salah satu sekolah dasar negeri di Kota Semarang, tepatnya di Kecamatan Semarang Utara. Berdasarkan hasil rapor mutu di tahun 2020, SDN Dadapsari dilihat dari capaian tiap standar nasional pendidikan, memiliki nilai rata-rata capaian 6, yang termasuk dalam kategori menuju SNP 4.

 RAPOR MUTU 2020 DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI, PENDIDIKAN DASAR DAN PENDIDIKAN MENENGAH KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN										
IDENTITAS										
Nama Sekolah	SD NEGERI DADAPSARI									
NPSN	20329393									
Kabupaten	Kota Semarang									
Provinsi	Prov. Jawa Tengah									
	2016	2017	2018	2019	2020					
Capaian Sekolah	5,1	5,41	5,61	6,49	6					
Capaian Kabupaten/kota	4,79	5,42	5,52	6,4	5,69					
Capaian Provinsi	4,66	5,48	5,58	6,39	5,62					
Capaian Nasional	4,34	5,13	5,51	6,38	5,55					
CAPAIAN PER STANDAR										
Nomor	Standar Nasional Pendidikan	Capaian 2016	Capaian 2017	Capaian 2018	Capaian 2019	Capaian 2020	Kota Semarang 2020	Prov. Jawa Tengah 2020	Nasional 2020	
1	Standar Kompetensi Lulusan	6,23	6,62	6,08	6,99	6,4	6,09	5,86	5,83	
2	Standar Isi	6,17	5,8	5,67	6,96	6,12	5,69	5,61	5,57	
3	Standar Proses	5,65	6,54	6,64	6,99	5,44	5,43	5,34	5,25	
4	Standar Penilaian Pendidikan	5,32	6,1	6,8	6,99	6,03	6,26	6,21	6,17	
5	Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan	3,45	2,94	4,43	6,18	6,74	5,85	5,97	5,9	
6	Standar Sarana dan Prasarana Pendidikan	4,6	3,85	3,54	3,93	5,09	4,48	4,5	4,45	
7	Standar Pengelolaan Pendidikan	4,48	5,9	6,03	6,92	6,06	6,01	5,8	5,71	
8	Standar Pembinaan	4,87	5,54	5,7	6,99	6,12	5,72	5,68	5,51	
KATEGORI CAPAIAN										
	Kategori	Batas Bawah		Batas Atas						
*	Menuju SNP 1	0		2,04						
**	Menuju SNP 2	3,05		3,7						
***	Menuju SNP 3	3,71		5,06						
****	Menuju SNP 4	5,07		6,66						
*****	SNP	6,67		7						

Gambar 2.4. Rapor Mutu SDN Dadapsari

Secara spesifik, pemetaan mutu dari hasil capaian rapor mutu SDN Dadapsari adalah sebagai berikut:

1) Standar kompetensi lulusan

Standar kompetensi lulusan dengan nilai rata-rata 6,4 termasuk kategori menuju SNP 4. Mutu yang diharapkan sudah terpenuhi, meskipun belum mencapai SNP.

2) Standar isi

Standar isi memiliki nilai rata-rata 6,12 termasuk kategori menuju SNP 4. Namun pada aspek menyelenggarakan aspek kurikulum pada muatan lokal memiliki nilai 3,33 yang masih perlu perhatian.

3) Standar proses

Standar proses sendiri memiliki nilai rata-rata 5,44 termasuk kategori menuju SNP 4. Namun pada aspek mendapatkan evaluasi dari kepala sekolah dan pengawas sekolah memiliki nilai 1,7. Dan pada aspek melakukan penilaian otentik secara komprehensif memiliki nilai 3,41.

4) Standar penilaian pendidikan

Standar penilaian pendidikan dengan nilai rata-rata 6,03 termasuk kategori menuju SNP 4. Maka mutu yang diharapkan sudah terpenuhi, meskipun belum mencapai SNP.

5) Standar pendidik dan tenaga kependidikan

Standar pendidik dan tenaga kependidikan memiliki nilai rata-rata 6,74 termasuk kategori menuju SNP 4. namun pada aspek tersedia kepala tenaga laboratorium berpengalaman sesuai dan memiliki kepala tenaga pustakawan berpengalaman sesuai memiliki nilai 1,4.

6) Standar sarana dan prasarana pendidikan

Standar sarana dan prasarana di SDN Dadapsari mendapatkan nilai rata-rata 5,09 termasuk menuju SNP 4, yang menjadi perhatian adalah pada aspek memiliki kapasitas rombongan belajar yang sesuai dan memadai dengan nilai 1,17, lalu memiliki ragam prasarana sesuai ketentuan dengan nilai 1,43, dan memiliki laboratorium IPA sesuai standar dengan nilai 3,36. Selanjutnya aspek memiliki ruang sirkulasi sesuai standar, memiliki ruang tata usaha sesuai standar, memiliki ruang konseling sesuai standar, memiliki ruang organisasi kesiswaan sesuai standar, kondisi ruang tata usaha layak pakai, kondisi ruang konseling layak pakai, kondisi ruang organisasi kesiswaan layak pakai memiliki nilai 1.

7) Standar pengelolaan pendidikan

Standar pengelolaan pendidikan memiliki nilai rata-rata 6,06 termasuk menuju SNP 4, namun pada aspek melaksanakan

pengelolaan bidang kurikulum dan kegiatan pembelajaran masih pada angka 2,1.

8) Standar pembiayaan


Standar pembiayaan dengan nilai rata-rata 6,12 termasuk kategori menuju SNP 4. Maka mutu yang diharapkan sudah terpenuhi, meskipun belum mencapai SNP.

c. SDN Rejosari 01



Gambar 2.5. Tampak Depan SDN Rejosari 01

SDN Rejosari 01 adalah salah satu sekolah dasar negeri di Kota Semarang, tepatnya di Kecamatan Semarang Timur. Berdasarkan hasil rapor mutu di tahun 2020, SDN Rejosari 01 dilihat dari capaian tiap standar nasional pendidikan, memiliki nilai rata-rata capaian 5,63 yang termasuk dalam kategori menuju SNP 4.

 RAPOR MUTU 2020 DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI, PENDIDIKAN DASAR DAN PENDIDIKAN MENENGAH KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN									
IDENTITAS									
Nama Sekolah	SD NEGERI REJOSARI 01								
NPSN	20337851								
Kabupaten	Kota Semarang								
Provinsi	Prov. Jawa Tengah								
	2016	2017	2018	2019	2020				
Capaian Sekolah	1,71	4,98	5,51	6,5	5,63				
Capaian Kabupaten/kota	4,79	5,42	5,52	6,4	5,69				
Capaian Provinsi	4,66	5,48	5,58	6,39	5,62				
Capaian Nasional	4,34	5,13	5,51	6,38	5,55				
CAPAIAN PER STANDAR									
Nomor	Standar Nasional Pendidikan	Capaian 2016	Capaian 2017	Capaian 2018	Capaian 2019	Capaian 2020	Kota Semarang 2020	Prov. Jawa Tengah 2020	Nasional 2020
1	Standar Kompetensi Lulusan	0	5,67	6,24	6,99	5,22	6,09	5,86	5,83
2	Standar Isi	1,07	4,53	6,2	6,99	5,04	5,69	5,61	5,57
3	Standar Proses	0,13	5,86	6,53	6,97	5,23	5,43	5,34	5,25
4	Standar Penilaian Pendidikan		5,49	6,21	6,99	6,12	6,26	6,21	6,17
5	Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan	4,42	3,54	4,65	5,98	6,52	5,85	5,97	5,9
6	Standar Sarana dan Prasarana Pendidikan	4,55	4,11	2,75	4,14	5,15	4,48	4,5	4,45
7	Standar Pengelolaan Pendidikan	1	5,18	6,21	6,92	6,05	6,01	5,8	5,71
8	Standar Pembiayaan	0,77	5,45	5,26	6,99	5,72	5,72	5,68	5,51
KATEGORI CAPAIAN									
	Kategori	Batas Bawah		Batas Atas					
*	Menuju SNP 1	0		2,04					
**	Menuju SNP 2	2,05		3,7					
***	Menuju SNP 3	3,71		5,06					
****	Menuju SNP 4	5,07		6,66					
*****	SNP	6,67		7					

Gambar 2.6. Rapor Mutu SDN Rejosari 01

Secara spesifik, pemetaan mutu dari hasil capaian rapor mutu SDN Rejosari 01 adalah sebagai berikut:

1) Standar kompetensi lulusan

Standar kompetensi lulusan dengan nilai rata-rata 5,22 termasuk kategori menuju SNP 4. Mutu yang diharapkan sudah terpenuhi, meskipun belum mencapai SNP.

2) Standar isi

Standar isi memiliki nilai rata-rata 5,04 termasuk kategori menuju SNP 4. Namun pada aspek menyediakan alokasi waktu pembelajaran sesuai struktur kurikulum yang berlaku memiliki nilai 2,48 dan menyelenggarakan aspek kurikulum pada muatan lokal memiliki nilai 1,11.

3) Standar proses

Standar proses sendiri memiliki nilai rata-rata 5,23 termasuk kategori menuju SNP 4. Namun pada aspek mendapatkan evaluasi dari kepala sekolah dan pengawas sekolah memiliki nilai 1,39.

4) Standar penilaian Pendidikan

Standar penilaian pendidikan dengan nilai rata-rata 6,12 termasuk kategori menuju SNP 4. Maka mutu yang diharapkan sudah terpenuhi, meskipun belum mencapai SNP.

5) Standar pendidik dan tenaga kependidikan

Standar pendidik dan tenaga kependidikan memiliki nilai rata-rata 6,52 termasuk kategori menuju SNP 4. namun pada aspek tersedia Kepala Tenaga Laboratorium dan Kepala Tenaga Pustakawan berpengalaman sesuai yang sesuai mendapatkan nilai 1,4.

6) Standar sarana dan prasarana Pendidikan

Standar sarana dan prasarana di SDN Rejosari 01 mendapatkan nilai rata-rata 5,15 termasuk menuju SNP 4, yang menjadi perhatian adalah pada aspek memiliki kapasitas rombongan belajar yang sesuai dan memadai dengan nilai 1,17, lalu memiliki ragam prasarana sesuai ketentuan dengan nilai 1,43, dan memiliki laboratorium IPA sesuai standar dengan nilai 3,36. Kemudian aspek memiliki ruang sirkulasi sesuai standar,

memiliki ruang konseling sesuai standar, memiliki ruang organisasi kesiswaan sesuai standar, kondisi ruang konseling layak pakai memiliki nilai 1.

7) Standar pengelolaan Pendidikan

Standar pengelolaan pendidikan memiliki nilai rata-rata 6,05 termasuk menuju SNP 4, namun pada aspek menyelenggarakan kegiatan layanan kesiswaan masih pada angka 2,45.

8) Standar pembiayaan

Standar pembiayaan dengan nilai rata-rata 5,72 termasuk kategori menuju SNP 4. Maka mutu yang diharapkan sudah terpenuhi, meskipun belum mencapai SNP.

2. Pembuatan rencana peningkatan mutu yang dituangkan dalam Rencana Kerja Sekolah (RKS)

a. SDN Wonotingal

Berdasarkan hasil pemetaan, rencana peningkatan mutu yang dilakukan SDN Wonotingal bila ditinjau dari aspek 8 standar nasional pendidikan adalah sebagai berikut:

1) Standar proses

Rencana peningkatan mutu untuk terlaksananya evaluasi dari kepala sekolah dan pengawas sekolah adalah berupa kegiatan rapat bulanan dan supervisi yang dilakukan oleh kepala sekolah dan pengawas sekolah secara berkala, minimal 2 kali dalam 1 semester (Darsimah, 19 Mei 2021).

2) Standar pendidik dan tenaga kependidikan

Rencana peningkatan mutu untuk tersedianya kepala tenaga laboratorium berpengalaman sesuai dan memiliki kepala tenaga pustakawan berpengalaman sesuai adalah dengan mengajukan tenaga usulan tenaga terkait melalui Dinas Pendidikan Kota Semarang (Darsimah, 19 Mei 2021).

3) Standar sarana dan prasarana pendidikan

Rencana peningkatan mutu untuk memiliki kapasitas rombongan belajar yang sesuai dan memadai, memiliki ragam prasarana sesuai ketentuan dan memiliki laboratorium IPA sesuai standar adalah dengan mengajukan usulan rehabilitasi sarana maupun prasarana ke dinas pendidikan Kota Semarang. Kemudian, untuk memiliki ruang sirkulasi sesuai standar, memiliki ruang tata usaha sesuai standar, memiliki ruang konseling sesuai standar, memiliki ruang organisasi kesiswaan sesuai standar, kondisi ruang tata usaha layak pakai, kondisi ruang konseling layak pakai, kondisi ruang organisasi kesiswaan layak pakai adalah dengan merencanakan rehabilitasi ringan menggunakan dana BOS yang dituangkan pada RKAS SDN Wonotingal (Darsimah, 19 Mei 2021).

4) Standar pengelolaan pendidikan

Rencana peningkatan mutu untuk meningkatkan dayaguna pendidik dan tenaga kependidikan adalah dengan melakukan *In*

House Training (IHT) maupun *Workshop* atau Pelatihan dengan menggandeng stakeholder terkait (Darsimah, 19 Mei 2021).

b. SDN Dadapsari

Berdasarkan hasil pemetaan, rencana peningkatan mutu yang dilakukan SDN Dadapsari bila ditinjau dari aspek 8 standar nasional pendidikan adalah sebagai berikut:

1) Standar isi

Rencana peningkatan mutu untuk menyelenggarakan aspek kurikulum pada muatan lokal adalah dengan melakukan telaah kurikulum yang ada, dan disesuaikan dengan kebutuhan satuan pendidikan yang dalam hal ini adalah melengkapi muatan kurikulum muatan lokal (Ainul Churotin, 19 Mei 2021).

2) Standar proses

Rencana peningkatan mutu untuk terlaksananya evaluasi dari kepala sekolah dan pengawas sekolah adalah berupa kegiatan rapat bulanan dan supervisi yang dilakukan oleh kepala sekolah dan pengawas sekolah secara berkala, minimal 2 kali dalam 1 semester. Kemudian untuk terlaksananya penilaian otentik secara komprehensif, adalah dengan melakukan IHT atau *Focus Group Discussion* (FGD) tentang pelaksanaan penilaian otentik secara komprehensif (Ainul Churotin, 19 Mei 2021).

3) Standar pendidik dan tenaga kependidikan

Rencana peningkatan mutu untuk tersedianya kepala tenaga laboratorium berpengalaman sesuai dan memiliki kepala tenaga pustakawan berpengalaman sesuai adalah dengan mengajukan tenaga usulan tenaga terkait melalui dinas pendidikan Kota Semarang (Ainul Churotin, 19 Mei 2021).

4) Standar sarana dan prasarana pendidikan

Rencana peningkatan mutu untuk memiliki kapasitas rombongan belajar yang sesuai dan memadai, memiliki ragam prasarana sesuai ketentuan dan memiliki laboratorium IPA sesuai standar adalah dengan mengajukan usulan rehabilitasi sarana maupun prasarana ke dinas pendidikan Kota Semarang. Selanjutnya, untuk memiliki ruang sirkulasi sesuai standar, memiliki ruang tata usaha sesuai standar, memiliki ruang konseling sesuai standar, memiliki ruang organisasi kesiswaan sesuai standar, kondisi ruang tata usaha layak pakai, kondisi ruang konseling layak pakai, kondisi ruang organisasi kesiswaan layak pakai adalah dengan merencanakan rehabilitasi ringan menggunakan dana BOS yang dituangkan pada RKAS SDN Dadapsari (Ainul Churotin, 19 Mei 2021).

5) Standar pengelolaan pendidikan

Rencana peningkatan mutu untuk melaksanakan pengelolaan bidang kurikulum dan kegiatan pembelajaran

adalah dengan melakukan telaah kurikulum kemudian disesuaikan dengan kebutuhan satuan pendidikan. Yang dalam hal ini adalah pengelolaan bidang kurikulum dan keberlangsungan kegiatan pembelajaran (Ainul Churotin, 19 Mei 2021).

c. SDN Rejosari 01

Berdasarkan hasil pemetaan, rencana peningkatan mutu yang dilakukan SDN Dadapsari bila ditinjau dari aspek 8 standar nasional pendidikan adalah sebagai berikut:

1) Standar isi

Rencana peningkatan mutu untuk menyediakan alokasi waktu pembelajaran sesuai dengan struktur kurikulum yang berlaku dan menyelenggarakan aspek kurikulum pada muatan lokal kami lakukan dengan melaksanakan telaah kurikulum sebelum dimulainya tahun pelajaran. Seperti biasa, kami melibatkan seluruh pendidik, tenaga kependidikan serta pengawas sekolah untuk duduk bersama (Sulastri, 28 Mei 2021).

2) Standar proses

Rencana peningkatan mutu untuk terlaksananya evaluasi dari kepala sekolah dan pengawas sekolah adalah berupa kegiatan rapat bulanan dan supervisi yang dilakukan oleh kepala sekolah dan pengawas sekolah secara berkala, minimal 2 kali dalam 1 semester (Sulastri, 28 Mei 2021).

3) Standar pendidik dan tenaga kependidikan

Rencana peningkatan mutu untuk tersedianya kepala tenaga laboratorium berpengalaman sesuai dan memiliki kepala tenaga pustakawan berpengalaman sesuai adalah dengan mengajukan tenaga usulan tenaga terkait melalui dinas pendidikan Kota Semarang (Sulastri, 28 Mei 2021).

4) Standar sarana dan prasarana Pendidikan

Rencana peningkatan mutu untuk memiliki kapasitas rombongan belajar yang sesuai dan memadai, memiliki ragam prasarana sesuai ketentuan dan memiliki laboratorium IPA sesuai standar adalah dengan mengajukan usulan rehabilitasi sarana maupun prasarana ke dinas pendidikan Kota Semarang. Kemudian, untuk memiliki ruang sirkulasi sesuai standar, memiliki ruang konseling sesuai standar, memiliki ruang organisasi kesiswaan sesuai standar, kondisi ruang konseling layak pakai adalah dengan merencanakan rehabilitasi ringan menggunakan dana BOS yang dituangkan pada RKAS SDN Rejosari 01 (Sulastri, 28 Mei 2021).

5) Standar pengelolaan Pendidikan

Rencana peningkatan mutu untuk menyelenggarakan kegiatan layanan kesiswaan adalah dengan memaksimalkan kinerja guru kelas untuk berkolaborasi dengan guru mata pelajaran turut aktif dalam memonitoring perilaku peserta didik

yang mulai menyimpang, dengan cara seperti itu, harapannya masalah yang dialami peserta didik bisa langsung diselesaikan dengan bantuan dari gurunya (Sulastri, 28 Mei 2021).

3. Melaksanakan pemenuhan mutu baik dalam pengelolaan satuan pendidikan maupun proses pembelajaran

a. SDN Wonotingal

1) Standar proses

Kegiatan rapat bulanan di SDN Wonotingal rutin dilaksanakan setiap bulan, dengan tujuan untuk selalu berkoordinasi ataupun mengevaluasi kegiatan yang akan dan atau telah dilaksanakan. Yang paling umum adalah antara Kepala Sekolah dengan Pendidik dan Tenaga Kependidikan. Namun secara khusus, rapat sering dilaksanakan sesuai dengan situasi dan kondisi di satuan pendidikan. Secara sederhana, apabila ada program sekolah yang harus segera disosialisasikan kepada peserta didik maupun orang tua/wali, maka rapat koordinasi akan melibatkan Komite Sekolah bahkan Pengawas Sekolah (Darsimah, 19 Mei 2021).

Supervisi yang dilakukan oleh kepala sekolah ataupun pengawas sekolah, sudah berjalan secara berkala. Untuk supervisi oleh kepala sekolah yaitu melalui supervisi pembelajaran yang dilakukan dalam waktu 1 semester sekali. Dalam kondisi pandemi covid-19 seperti sekarang, supervisi

tetap dilakukan melalui dalam jaringan, dalam hal ini menggunakan aplikasi google meet. Supervisi yang dilakukan oleh pengawas sekolahpun demikian (Darsimah, 19 Mei 2021).

2) Standar pendidik dan tenaga kependidikan

Usulan ke Dinas Pendidikan sudah dilakukan untuk tersedianya kepala tenaga laboratorium berpengalaman sesuai dan kepala tenaga pustakawan berpengalaman sesuai, namun memang belum dikabulkan. Berdasarkan peraturan pemerintah, satuan pendidikan sendiri memang tidak diperbolehkan untuk mengangkat tenaga honorer, wewenang tersebut ada di Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Darsimah, 19 Mei 2021).

3) Standar sarana dan prasarana pendidikan

Usulan ke Dinas Pendidikan sudah dilakukan untuk tersedianya kapasitas rombongan belajar yang sesuai dan memadai, memiliki ragam prasarana sesuai ketentuan dan memiliki laboratorium IPA sesuai standar. Untuk laboratorium IPA memang belum, namun alasan mengapa kapasitas rombongan belajar belum sesuai adalah karena SDN Wonotingal memiliki kapasitas jumlah peserta didik dalam tiap rombel dari A sampai D masih lebih dari 28 anak, khususnya kelas III sampai kelas VI. Oleh karena itu SDN Wonotingal menyiasatinya dengan melakukan penerimaan peserta didik baru tidak melebihi

kuota di kelas I (Darsimah, 19 Mei 2021). Kemudian, untuk memiliki ruang sirkulasi sesuai standar, memiliki ruang tata usaha sesuai standar, memiliki ruang konseling sesuai standar, memiliki ruang organisasi kesiswaan sesuai standar, kondisi ruang tata usaha layak pakai, kondisi ruang konseling layak pakai, kondisi ruang organisasi kesiswaan layak pakai sudah dilaksanakan meskipun belum maksimal (Darsimah, 19 Mei 2021).

4) Standar pengelolaan pendidikan

Untuk meningkatkan dayaguna khususnya pendidik, SDN Wonotingal telah melaksanakan secara mandiri, pelatihan media pembelajaran berbasis IT di masa pandemi covid-19 pada awal tahun pelajaran 2020/2021. Tujuannya adalah memberikan bekal keilmuan kepada Guru SDN Wonotingal dalam menyiapkan pembelajaran jarak jauh. Seiring waktu, SDN Wonotingal juga menjalin kerjasama dengan Universitas PGRI Semarang (UPGRIS) dan Universitas Semarang (USM) melalui kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) yang tentu sangat membantu SDN Wonotingal meningkatkan kualitas layanan pendidikan kepada peserta didik (Darsimah, 19 Mei 2021).

b. SDN Dadapsari

1) Standar isi

Kegiatan telaah kurikulum sudah dilaksanakan, tidak hanya berfokus pada aspek muatan lokal, namun kami bersama TPMPS juga melakukan penyempurnaan untuk beberapa aspek di kurikulum SDN Dadapsari. Angka kurang bagus yang berkaitan dengan muatan lokal, bukan berarti pembelajaran muatan lokal di SDN Dadapsari tidak berjalan, namun lebih tepatnya ada komponen dalam kurikulum muatan lokal yang memang belum terlengkapi dan keadaan yang ada sekarang sudah lebih baik (Ainul Churotin, 19 Mei 2021).

2) Standar proses

Evaluasi dari kepala sekolah dan pengawas sekolah sudah terlaksana, baik secara terjadwal, maupun kondisional. Secara terjadwal, SDN Dadapsari melaksanakan rapat dinas sebulan sekali, evaluasi dari Kepala Sekolah maupun masukan-masukan dari pendidik dan tenaga kependidikan biasa disampaikan pada forum tersebut. Kemudian, evaluasi dari pengawas sekolah, secara terjadwal 2 kali dalam 1 semester, dan hasil evaluasi tersebut didiskusikan bersama pada rapat dinas bulanan di SDN Dadapsari. Kemudian untuk pelaksanaan IHT atau FGD tentang pelaksanaan penilaian otentik secara komprehensif sudah dilakukan oleh guru. Banyak pertimbangan dalam

merencanakan dan memasukkan bentuk penilaian pada Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP). Di saat pandemi seperti sekarang, misalnya penilaian sikap, cenderung menggunakan jurnal dan pengamatan, baik secara langsung maupun tidak langsung pada perilaku peserta didik selama Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ). Sedangkan dalam kondisi normal, pendidik masih bisa menilai peserta didik dengan menggunakan penilaian diri atau penilaian antar teman. Kondisi semacam ini pasti berpengaruh pada ketercapaian kompetensi peserta didik. Pada penilaian pengetahuan dan keterampilanpun demikian, keterbatasan pada kondisi sekarang menjadi pertimbangan paling utama (Ainul Churotin, 19 Mei 2021).

3) Standar pendidik dan tenaga kependidikan

Senada yang disampaikan Darsimah, usulan ke Dinas Pendidikan untuk tersedianya kepala tenaga laboratorium berpengalaman sesuai dan kepala tenaga pustakawan berpengalaman sesuai sudah dilakukan, namun belum dikabulkan (Ainul Churotin, 19 Mei 2021).

4) Standar sarana dan prasarana pendidikan

Usulan untuk bisa mendapatkan kapasitas rombongan belajar yang sesuai dan memadai, memiliki ragam prasarana sesuai ketentuan dan memiliki laboratorium IPA sesuai standar sudah tersampaikan ke Dinas Pendidikan, namun memang

belum dikabulkan (Ainul Churotin, 19 Mei 2021). Kemudian, untuk memiliki ruang sirkulasi sesuai standar, memiliki ruang tata usaha sesuai standar, memiliki ruang konseling sesuai standar, memiliki ruang organisasi kesiswaan sesuai standar, kondisi ruang tata usaha layak pakai, kondisi ruang konseling layak pakai, kondisi ruang organisasi kesiswaan layak pakai sudah dilakukan perbaikan dengan menggunakan dana BOS untuk rehabilitasi ringan (Ainul Churotin, 19 Mei 2021).

5) Standar pengelolaan pendidikan

Telaah kurikulum tingkat satuan pendidikan di SDN Dadapsari sudah terlaksana di awal tahun pelajaran. Termasuk didalamnya adalah pengelolaan bidang kurikulum dan keberlangsungan kegiatan pembelajaran yang masih belum sempurna, dalam hal ini administrasi Kepala Sekolah, Pendidik, dan Tenaga Kependidikan yang harus dilengkapi ketika menyempurnakan kurikulum (Ainul Churotin, 19 Mei 2021).

c. SDN Rejosari 01

1) Standar isi

Kegiatan telaah kurikulum sudah dilaksanakan, tidak hanya berfokus pada alokasi waktu pembelajaran sesuai dengan struktur kurikulum yang berlaku dan menyelenggarakan aspek kurikulum pada muatan lokal. Namun, kami juga melakukan penyempurnaan untuk beberapa aspek di kurikulum SDN

Rejosari 01, terutama menyesuaikan dengan ciri khas di SDN Rejosari 01 yaitu sebagai sekolah cagar budaya (Sulastri, 28 Mei 2021).

2) Standar proses

Evaluasi dari kepala sekolah dan pengawas sekolah sudah terlaksana baik secara daring maupun luring. Secara terjadwal, SDN Rejosari 01 melaksanakan rapat dinas bulanan, namun dalam situasi atau kondisi yang mendadak, rapat koordinasi juga kami lakukan. Contohnya beberapa waktu yang lalu, sekolah kami di menit-menit akhir, diminta menjadi sekolah percontohan percobaan pembelajaran tatap muka kecamatan Semarang Timur, secara cepat mau tidak mau kami koordinasi untuk lancarnya kegiatan tersebut. Kemudian, evaluasi dari pengawas sekolah, secara terjadwal 2 kali dalam 1 semester, dan hasil evaluasi tersebut didiskusikan bersama pada rapat dinas bulanan di SDN Rejosari 01 (Sulastri, 28 Mei 2021).

3) Standar pendidik dan tenaga kependidikan

Usulan ke Dinas Pendidikan untuk mendapatkan kepala tenaga laboratorium berpengalaman sesuai dan kepala tenaga pustakawan berpengalaman sesuai sudah dilakukan, namun belum dikabulkan. Di SDN Rejosari 01 sudah memiliki tenaga pustakawan, meskipun belum sesuai kompetensinya (Sulastri, 28 Mei 2021).

4) Standar sarana dan prasarana Pendidikan

Usulan untuk bisa mendapatkan kapasitas rombongan belajar yang sesuai dan memadai, memiliki ragam prasarana sesuai ketentuan dan memiliki laboratorium IPA sesuai standar sudah kami lakukan. Kemudian, untuk memiliki ruang sirkulasi sesuai standar, memiliki ruang konseling sesuai standar, memiliki ruang organisasi kesiswaan sesuai standar, kondisi ruang konseling layak pakai sudah dilakukan pemeliharaan bangunan ringan (Sulastri, 28 Mei 2021).

5) Standar pengelolaan Pendidikan

Penyelenggaraan kegiatan layanan kesiswaan di tengah pandemi covid 19 sudah kami lakukan. Misalnya dalam PJJ sekarang ini, masalah yang paling banyak terjadi adalah peserta didik dari tidak memiliki gawai untuk digunakan sebagai media pembelajaran, hingga masalah-masalah keluarga yang dialaminya. Layanan kolaborasi dilakukan oleh guru kelas dan guru mata pelajaran untuk membantu menyelesaikan masalah yang dialami peserta didik selama PJJ (Sulastri, 28 Mei 2021).

4. Monitoring dan evaluasi proses pelaksanaan pemenuhan mutu yang telah dilakukan

Pelaksanaan monitoring dan evaluasi proses pelaksanaan pemenuhan mutu di satuan pendidikan berdasarkan pada kejelasan

tujuan kegiatan, relevansi kegiatan dengan pemenuhan mutu, kesesuaian materi dengan tujuan kegiatan, kelayakan alokasi waktu, dan ketercapaian tujuan kegiatan.

LPMP Jawa Tengah pada tahun 2020 melaksanakan Bimbingan Teknis tentang *Quality Assurance (QA) Model* bagi sekolah model SPMI di Jawa Tengah. Dalam kegiatan tersebut, LPMP Jawa Tengah telah menyusun instrumen khusus yang berguna untuk mengevaluasi atau mengaudit proses penjaminan mutu pendidikan yang dilaksanakan oleh sekolah. Yang kemudian, instrumen itulah yang menjadi bahan acuan sejauh mana pemenuhan mutu 8 standar nasional pendidikan telah dilaksanakan di Kota Semarang.

Dengan instrumen tersebut diharapkan sekolah dapat mengevaluasi apakah prosedur-prosedur yang ditetapkan oleh sekolah berjalan dengan baik atau tidak. Semakin banyak prosedur yang dijalankan oleh sekolah menunjukkan keberhasilan sekolah dalam mengimplementasikan prosedur, yang merefleksikan prestasi sekolah dalam capaian Standar Nasional Pendidikan.

a. SDN Wonotingal

Data yang peneliti peroleh dari halaman website <https://hasilauditmutu.lpmpjateng.go.id/> menunjukkan bahwa SDN Wonotingal dari seluruh 8 standar, mencapai 98% dalam pemenuhan mutu di tahun 2020, ada tahapan yang belum dilaksanakan oleh sekolah, yaitu pada standar penilaian, tim

pengembang penilaian belum menganalisis kualitas instrumen (konstruksi, materi, bahasa) untuk PTS dan PAS. Kemudian pada standar pembiayaan, tim pengembang pembiayaan dan bendahara belum melakukan penggalan sumber dana.

b. SDN Dadapsari

Data yang peneliti peroleh dari halaman website <https://hasilauditmutu.lmpjateng.go.id/> SDN Dadapsari dari seluruh 8 standar, sudah mencapai 100% dalam pemenuhan mutu di tahun 2020. Hal tersebut menunjukkan bahwa standar nasional pendidikan sudah terpenuhi seluruhnya.

c. SDN Rejosari 01

Data yang peneliti peroleh dari halaman website <https://hasilauditmutu.lmpjateng.go.id/> SDN Rejosari 01 dari seluruh 8 standar, mencapai 90% dalam pemenuhan mutu di tahun 2020. Ada tahapan yang belum dilaksanakan oleh sekolah, yaitu pada standar pendidik dan tenaga kependidikan, sekolah belum mengusulkan guru untuk melanjutkan pendidikan formal. Kemudian pada standar sarana dan prasarana, pengembang sarpras belum melakukan pemetaan sarpras, belum melakukan analisis kebutuhan sarpras, belum menyusun rekomendasi pemenuhan sarpras, belum menetapkan dan mengesahkan rekomendasi pemenuhan sarpras, belum mengevaluasi hasil pelaksanaan ROPS, belum membuat rekomendasi tindak lanjut, dan belum menetapkan Standar Mutu

Sarpras. Terakhir, standar pengelolaan, sekolah belum menyusun pedoman pengelolaan sekolah, belum melakukan sosialisasi pedoman pengelolaan sekolah, dan belum menyusun rekomendasi peningkatan mutu.

5. Menetapkan standar baru dan penyusunan strategi peningkatan mutu berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi

a. SDN Wonotingal

1) Standar kompetensi lulusan

Fokus peningkatan pada standar kompetensi lulusan adalah merumuskan aktivitas kegiatan intrakurikuler, ekstrakurikuler, dan kokurikuler yang dapat menunjang tercapainya standar nasional pendidikan. Alasannya jelas, karena belum terselesaikannya penanganan dari pandemi covid-19, maka demi tetap menjamin kualitas daripada lulusan SDN Wonotingal. Kemudian, Tim Pengembang Sekolah perlu menentukan dokumen yang relevan dengan kegiatan pemenuhan mutu di satuan pendidikan. Terutama yang berhubungan dengan kegiatan intrakurikuler, ekstrakurikuler, dan kokurikuler (Darsimah, 19 Mei 2021).

2) Standar isi

Peningkatan mutu pada standar isi berupa analisis kondisi lingkungan. Meliputi komite sekolah, masyarakat, dinas pendidikan, sumber daya alam, dan sosial budaya. Karena

Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) harus disusun sesuai dengan kebutuhan, karakteristik dan potensi satuan pendidikan serta lingkungan di daerah setempat.

Analisis kondisi lingkungan di SDN Wonotingal adalah proses pengkajian lingkungan SDN Wonotingal yang difokuskan untuk memperoleh data dan informasi tentang peluang, tantangan, dan rencana tindak lanjut, sebagai acuan bagi sekolah untuk mengembangkan KTSP dan penyusunan rencana kerja sekolah (Darsimah, 19 Mei 2021).

3) Standar proses

Standar proses yang ditingkatkan antara lain mereview dan merevisi silabus serta RPP, kemudian memastikan prasyarat pembelajaran Melaksanakan penilaian proses dan hasil dengan berbagai teknik penilaian. Pembelajaran secara daring maupun luring, meskipun sudah bukan menjadi hal yang baru, namun perlu disiapkan dan disesuaikan dengan kondisi di tiap satuan pendidikan. Di tahun pelajaran 2020/2021, SDN Wonotingal menggunakan silabus Belajar Dari Rumah (BDR) yang disederhanakan dengan menentukan kompetensi dasar yang esensial untuk disampaikan kepada peserta didik. RPP pun sudah mulai penyederhanaan dengan hanya 1 (satu) lembar dengan tetap memperhatikan muatan isinya, terutama

penggunaan cara penilaian yang sesuai dengan kondisi pandemi covid-19 (Darsimah, 19 Mei 2021).

4) Standar penilaian

Peningkatan mutu pada standar penilaian berfokus pada penyusunan kisi-kisi instrumen penilaian pengetahuan dan keterampilan untuk penilaian harian, penilaian tengah semester, dan juga penilaian akhir semester. Berdasarkan hasil monev di tahun sebelumnya, penyusunan kisi-kisi memang sudah dilaksanakan, namun masih belum sesuai dengan yang diharapkan (Darsimah, 19 Mei 2021).

b. SDN Dadapsari

1) Standar kompetensi lulusan

Standar kompetensi lulusan yang akan ditingkatkan di SDN Dadapsari yaitu menganalisis esensi Standar Kompetensi Lulusan (SKL) dan mengidentifikasi tuntutan SKL mulai dari aspek sikap, aspek pengetahuan, kemudian aspek keterampilan. Harapannya, dengan mengidentifikasi tuntutan SKL, kualitas lulusan SDN Dadapsari di masa pandemi covid-19 tetap sesuai dengan esensi. Misalnya dalam aspek sikap, salah satu esensinya, peserta didik memiliki perilaku yang mencerminkan sikap Beriman dan bertakwa kepada Tuhan yang maha esa, maka muatan dalam ko kurikuler bisa berbentuk pembiasaan doa bersama, kemudian dalam intra kurikuler, mata pelajaran

Pendidikan Agama dan Budi Pekerti (PABP) serta Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKN) bisa memberikan penguatan karakter religius dalam penyampaian materi pembelajarannya. Kemudian untuk aspek pengetahuan dan keterampilan juga demikian, yaitu mementingkan esensi dari SKL satuan pendidikan (Ainul Churotin, 19 Mei 2021).

2) Standar isi

Pada standar isi, analisis kondisi sekolah menjadi fokus peningkatan mutu. Di dalamnya terdapat 8 SNP di SDN Dadapsari yang perlu dianalisis kekuatan dan kelemahannya. Di SDN Dadapsari sendiri pada standar isi misalnya, sudah menerapkan KTSP 2013 dan Kurikulum yang digunakan sudah melalui tahap penyesuaian dengan kondisi saat ini. Namun kelemahannya kurang melibatkan stakeholder dalam pengembangan kurikulum. Sehingga ada kemungkinan kurikulum yang telah tersusun kurang merespon tuntutan lokal, global serta belum mempertimbangkan perkembangan peserta didik sesuai kondisi pandemi (Ainul Churotin, 19 Mei 2021)

3) Standar proses

Standar proses yang ditingkatkan berfokus pada pengembangan Langkah-langkah pembelajaran untuk mencapai kompetensi sikap spiritual, sikap sosial, pengetahuan dan keterampilan. Pada umumnya semua guru sudah memiliki

silabus dan RPP, kemudian semua guru sudah menggunakan berbagai pendekatan, strategi, metode, teknik yang sesuai dengan karakteristik KI dan KD yang diajarkan. Namun silabus dan RPP yang dibuat sebagian belum sesuai dengan kondisi pandemi. Kemudian juga kurang optimalnya penggunaan media pembelajaran yang dilakukan oleh guru ketika PJJ (Ainul Churotin, 19 Mei 2021).

4) Standar penilaian

Peningkatan mutu pada standar penilaian di SDN Dadapsari berfokus pada penyusunan kisi-kisi instrumen penilaian pengetahuan untuk penilaian harian, penilaian tengah semester, dan juga penilaian akhir semester. Pada umumnya memang sudah terlaksana, namun perlu adanya peningkatan, karena belum semuanya membuat kisi-kisi untuk penilaian. Kemudian administrasi untuk penilaian seperti pedoman penilaian dan kartu soal masih belum semua guru membuatnya (Ainul Churotin, 19 Mei 2021).

c. SDN Rejosari 01

1) Standar kompetensi lulusan

Standar mutu yang ditingkatkan pada kompetensi lulusan di SDN Rejosari 01 dilakukan dengan merumuskan kembali kegiatan intrakurikuler, ekstrakurikuler, dan kokurikuler yang dapat menunjang kompetensi peserta didik di masa kebiasaan

baru. Pembelajaran tatap muka kedepannya membutuhkan banyak persiapan, yang utama tentu kurikulum harus disesuaikan dengan tantangan sekarang, harapan kami lulusan SDN Rejosari 01 tetap berkualitas di tengah pandemi (Sulastri, 28 Mei 2021).

2) Standar isi

Peningkatan mutu pada standar isi di SDN Rejosari 01 berupa analisis kondisi lingkungan. Analisis ini untuk mengetahui peluang dan tantangan yang ada di satuan pendidikan, meliputi komite sekolah, masyarakat sekitar, sumber daya alam, dan sosial budaya. Kemudian kami perlu mengorganisasikan muatan kurikuler sebagai ciri khas SDN Rejosari 01 sebagai sekolah cagar budaya, untuk dapat mengedepankan etika dan budaya setempat yang dileburkan dalam muatan intrakurikuler, ekstrakurikuler dan kokurikuler (Sulastri, 28 Mei 2021).

3) Standar proses

Standar proses yang ditingkatkan di SDN Rejosari 01 adalah mengembangkan langkah-langkah pembelajaran untuk mencapai kompetensi sikap spiritual, sikap sosial, pengetahuan dan keterampilan. Pengembangan disini lebih banyak diprioritaskan pada penggunaan teknologi oleh para guru, karena Blended Learning yang diterapkan selama ini masih belum

optimal. Kemudian, pelaksanaan pembelajaran, mulai dari pendekatan, model dan metode pembelajaran yang digunakan harus lebih variatif, supaya pengembangan karakter, kemampuan literasi, kemampuan berpikir kritis, kreatif, komunikasi dan kolaborasi peserta didik terasah (Sulastri, 28 Mei 2021).

4) Standar penilaian

Peningkatan mutu pada standar penilaian diawali dengan penetapan KKM berdasarkan daya dukung, kompleksitas, intake siswa dan analisis hasil penilaian. Karena selama pandemi covid-19, perolehan hasil belajar perlu dianalisis sejauh mana capaian peserta didik. Kemudian, penyusunan kisi-kisi instrumen penilaian pengetahuan untuk penilaian harian, penilaian tengah semester, dan juga penilaian akhir semester perlu dilakukan dengan baik. Selama ini sudah terlaksana dan perlu adanya penyamaan persepsi dan penyempurnaan (Sulastri, 28 Mei 2021).

B. Pembahasan Hasil Penelitian Tentang Implementasi SPMI di Kota Semarang

Dilihat dari hasil pemetaan rapor mutu, Darsimah (19 Mei 2021) menyatakan, memang banyak hal yang harus dilakukan dalam pemenuhan mutu di SDN Wonotingal, dengan segala keterbatasan, usaha-usaha sudah diupayakan untuk tercapainya standar nasional pendidikan di SDN Wonotingal.

Ainul Churotin (19 Mei 2021) juga demikian, menyampaikan bahwa bila dibandingkan dengan hasil di tahun 2019, dilihat dari angka memang mengalami penurunan, namun hasil tersebut lebih realistis dan sesuai dengan kondisi sesungguhnya di SDN Dadapsari. Kemudian, upaya-upaya pemenuhan dan peningkatan mutu juga terus kami lakukan secara berkelanjutan baik secara mandiri maupun dengan melibatkan pihak lain.

Sulastri (28 Mei 2021), juga menyampaikan di SDN Rejosari 01, sudah banyak usaha-usaha yang kami lakukan, belum bisa dikatakan berhasil, namun sampai sekarang kami terus mencoba untuk memenuhi kebutuhan dalam peningkatan layanan kepada masyarakat, khususnya kepada peserta didik.

Selama observasi, peneliti melihat secara umum yang ada di ketiga sekolah tersebut perbaikan-perbaikan memang sedang dilakukan. Tidak hanya dari sarana dan prasarana yang ada, namun juga kualitas pendidik dan tenaga kependidikannya pun turut diperhatikan dan diberdayakan melalui pelatihan-pelatihan, baik yang diselenggarakan Dinas Pendidikan, maupun

secara mandiri oleh sekolah. Semua kepala sekolah sepakat bahwa segala upaya yang dilakukan, demi meningkatkan layanan kepada masyarakat, khususnya pada peserta didik.

Dapat dilihat disini bahwa kepala sekolah adalah kunci pendorong bagi perkembangan dan kemajuan sekolah serta bertanggungjawab untuk meningkatkan akuntabilitas keberhasilan siswa dan programnya (Fitrah, 2017: 32). Kemudian, pemetaan mutu yang menjadi awal dari perbaikan mutu yang ada di satuan pendidikan berpedoman dari rapor mutu yang memiliki kategori capaian standar berwarna oranye. Uniknya, di SDN Dadapsari memulainya dengan memvalidasi terlebih dahulu hasil dari rapor mutu tersebut, untuk memastikan kebenarannya dengan kondisi sebenarnya, kemudian dilanjutkan dengan pemetaan mutu pada umumnya. Bagi peneliti, tindakan ini sangat bagus, karena di tahun-tahun sebelumnya seringkali terjadi ketimpangan antara hasil rapor mutu dengan kondisi riil di satuan pendidikan.

Penyusunan rencana pemenuhan mutu di satuan pendidikan diwujudkan dalam bentuk RKS baik jangka menengah maupun tahunan (Rahwati, 2019: 17). Pembuatan rencana dalam meningkatkan mutu merupakan salah satu komponen yang berfungsi sebagai acuan pelaksanaan kegiatan di satuan pendidikan. Ketika rencana sudah dibuat, satuan pendidikan dapat melihat sejauh mana rencana sudah terrealisasi.

Dari pengamatan dan dari dokumen RKS dan RKJM yang peneliti lihat, beberapa rencana peningkatan mutu ada yang bisa dimasukkan dan

ada yang tidak bisa dimasukkan dan dianggarkan, misalnya pengadaan tenaga honorer dan pembangunan gedung atau ruangan di sekolah yang satuan pendidikan tidak memiliki kewenangan akan hal tersebut. Perencanaan yang baik akan menentukan keberhasilan dari sebuah program di satuan pendidikan, tentu harus berdasarkan data dan fakta. Data dan fakta disini adalah kondisi satuan pendidikan dan hasil rapor mutunya.

Pemenuhan mutu, dalam pelaksanaannya bertujuan untuk merealisasikan seluruh program dan kegiatan yang telah dirancang dan telah tertuang dalam dokumen perencanaan pemenuhan mutu satuan pendidikan yang harus dikerjakan oleh seluruh pemangku kepentingan (Rahwati, 2019: 19). Dalam pelaksanaan supervisi, seringkali guru merasa terbebani dengan adanya supervisi, namun serangkaian kegiatan dalam supervisi yang dilakukan oleh Kepala Sekolah sebenarnya bertujuan membantu guru mengembangkan kemampuannya dalam mengelola pembelajaran untuk mencapai tujuan pembelajaran. Kemudian supervisi yang dilakukan pengawas juga tidak terlepas dari penilaian kinerja kepala sekolah dalam mengelola satuan pendidikan. Prinsip supervisi yang dilakukan, tujuan akhirnya adalah mengembangkan kemampuan profesionalisme guru dan juga kepala sekolah di satuan Pendidikan.

Standar pendidik dan tenaga kependidikan yang hendak dipenuhi, sekolah mengajukan usulan ke dinas pendidikan Kota Semarang. Kota Semarang dalam upaya peningkatan layanan kepada masyarakat, khususnya dalam bidang pendidikan, telah melakukan rekrutmen secara besar-besaran

pendidik dan tenaga kependidikan NON ASN sejak tahun 2017 guna memenuhi kekurangan pendidik dan tenaga kependidikan di tiap satuan pendidikan di Kota Semarang. Tujuannya tentu tidak sekedar wujud peningkatan layanan kepada masyarakat, namun juga dalam rangka meningkatnya kualitas atau mutu pendidikan di Kota Semarang.

Sarana dan prasarana di tiap satuan pendidikanpun seringkali disorot, memang tidak dipungkiri keterbatasan anggaran menjadi kendala sekolah dalam pemenuhan sarana dan prasarana yang layak untuk digunakan. Pandemi covid-19 seperti sekarang juga memaksa satuan pendidikan menyediakan sarana dan prasana yang memadai untuk protokol kesehatan dalam pembelajaran tatap muka. Dalam pelaksanaan monitoring dan evaluasipun, satuan pendidikan sangat terbantu dengan model penjaminan mutu (QA Model) berbasis POS SNP dari LPMP Jawa Tengah. Kemudian, penetapan standar baru dan penyusunan strategi, berfokus pada 4 standar yang memungkinkan satuan pendidikan untuk meningkatkan mutu berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi. Yaitu pada standar kompetensi kelulusan, standar isi, standar proses, dan standar penilaian pendidikan.

Dapat peneliti simpulkan, implementasi SPMI pada sekolah dasar di Kota Semarang sudah berjalan baik di ketiga sekolah model. Sebagai sekolah yang menjadi percontohan di setiap kecamatan, hal ini sangat penting, karena sekolah tersebut akan menjadi acuan bagi sekolah-sekolah di sekitarnya yang sudah mendapatkan pengimbasan SPMI. Kemudian budaya penjaminan mutu yang telah dilaksanakanpun memberikan dampak

positif tidak hanya bagi sekolah model, namun juga bagi sekolah imbas. Lebih dekat lagi, budaya mutu juga tumbuh pada proses pembelajaran yang dilaksanakan oleh pendidik. Di akhir, hasil implementasi SPMI oleh satuan pendidikan menjadi modal untuk menghadapi akreditasi oleh SPME, dalam hal ini adalah Badan Akreditasi Nasional (BAN).